

SAID HOMADLAN

city cost

MUHAMMADIYAH DALAM SOROTAN

MEDIA



Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di Indonesia yang paling berpengaruh sudah tentu banyak menarik berbagai kalangan ilmuwan untuk mengkajinya. Selama ini studi atau kajian mengenai Muhammadiyah dari berbagai aspeknya sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun secara khusus studi mengenai Muhammadiyah yang berkaitan dengan media massa dapat dikatakan masih sangat terbatas. Buku ini diharapkan dapat mengisi keterbatasan itu, atau setidaknya dapat menjadi pendorong munculnya kajian-kajian mengenai Muhammadiyah dalam perspektif komunikasi. Buku ini merupakan hasil pengembangan dari penelitian mengenai representasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di surat kabar. Dengan representasi ini akan diketahui bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ditampilkan di surat kabar. Apakah Muhammadiyah sudah ditampilkan dan digambarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan identitasnya? Ataukah justru praktik-praktik misrepresentasi yang ditunjukkan oleh surat kabar?



UHAMKA PRESS



MUHAMMADIYAH DALAM SOROTAN MEDIA

Representasi Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam di Surat Kabar

Said Romadlan

PENGANTAR PENULIS

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di Indonesia yang berpengaruh sudah tentu banyak menarik berbagai kalangan ilmuwan untuk mengajinya. Selama ini studi atau kajian mengenai Muhammadiyah dari berbagai aspeknya sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan, baik dalam maupun luar negeri. Namun secara khusus studi mengenai Muhammadiyah yang berkaitan dengan media massa dapat dikatakan masih terbatas. Buku ini diharapkan dapat mengisi keterbatasan itu, atau setidaknya dapat menjadi pendorong munculnya kajian-kajian mengenai Muhammadiyah dalam perspektif komunikasi selanjutnya.

Buku ini merupakan hasil pengembangan dari penelitian mengenai representasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di surat kabar. Akhir-akhir ini persoalan representasi menjadi banyak diperbincangkan, sekurang-kurangnya karena tiga hal. Pertama representasi terkait dengan demokratisasi, karena dengan representasi dapat menunjukkan bagaimana seseorang ataupun kelompok ditampilkan dan menampilkan dirinya sebagaimana adanya dalam sebuah dinamika sosial, budaya, dan politik. Kedua, representasi juga erat hubungannya dengan persoalan identitas. Politik identitas menjadi sangat penting saat ini karena tercerabutnya berbagai bentuk identitas seiring dengan begitu kuatnya arus homogenisasi budaya melalui berbagai media. Dengan representasi identitas itu dipertarungkan yang akhirnya akan menjadikan identitas itu menguat atau melemah. Ketiga, representasi berhubungan dengan ideologi. Terutama ideologi dominan yang dapat menentukan bentuk-bentuk dari representasi seseorang atau kelompok serta bentuk budaya tertentu.

Fokus utama buku ini adalah mengenai representasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di surat kabar selama muktamar ke-46 di Yogyakarta tahun 2010 lalu. Dengan representasi akan diketahui bagaimana Muhammadiyah sebagai organisasi Islam ditampilkan di surat kabar. Apakah Muhammadiyah sudah ditampilkan dan digambarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan identitasnya? Ataukah justru praktik-praktik misrepresentasi yang ditonjolkan oleh surat kabar? Ada lima surat kabar nasional yang saya anggap representatif yang digunakan untuk mengetahui representasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam. Yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Suara Pembaruan. Kelima surat kabar tersebut kemudian dianalisis pemberitaannya dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengetahui pola-pola pemberitaannya mengenai Muhammadiyah, terutama selama muktamar ke-46. Selanjutnya untuk memahami representasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di surat kabar digunakan analisis framing dengan model Gamson dan Modigliani.

Seperti yang akan dijelaskan secara mendetail dalam buku ini, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam direpresentasikan oleh surat kabar dengan berbagai bentuk representasi. Secara garis besar, representasi Muhammadiyah di surat kabar sebenarnya sudah ditampilkan sebagaimana identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Hal yang menarik untuk diketahui dari buku ini adalah mengenai beberapa wacana dan kritik yang juga ditampilkan oleh surat kabar. Wacana dan kritik mengenai Muhammadiyah oleh surat kabar ini sepertinya sudah terlupakan bersama dengan selesainya muktamar dan terpilihnya Din Syamsuddin sebagai ketua umum PP Muhammadiyah. Padahal wacana dan kritik itu merupakan isu penting yang akan menentukan masa depan

Muhammadiyah, terutama pada muktamar Muhammadiyah berikutnya di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2015. Misalnya kritik mengenai regenerasi Muhammadiyah yang dianggap gagal. Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi kader yang tidak memunyai kader. Atau kritik mengenai keterwakilan perempuan di pengurus pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah dianggap menjadi organisasi laki-laki yang tentu dalam pengambilan keputusannya lebih beraroma lelaki, meskipun implikasi kebijakan itu tidak hanya untuk laki-laki. Tentu masih ada beberapa wacana dan kritik lain yang dapat dibaca dalam buku ini.

Sebagai buku yang diolah dari hasil penelitian, sistematika yang disusun dalam buku ini harus diakui agak mengikuti sistematika sebuah hasil penelitian. Meskipun begitu ada beberapa penekanan yang berbeda yang akhirnya menurut saya justru akan memperlengkap pembahasan buku ini. Pada bagian awal, melalui pengantar saya menggambarkan permasalahan mengenai mengapa pembahasan mengenai representasi Muhammadiyah itu menarik. Dalam bagian ini juga saya kemukakan metode yang saya gunakan untuk menganalisis permasalahan. Selanjutnya pada bagian kedua, saya paparkan beberapa kerangka pemikiran dan teori yang menjadi landasan dari buku ini, terutama mengenai teori representasi, teori framing dan teori konstruksi realitas. Pada bagian ketiga, yang menjadi bagian inti dari buku ini saya jelaskan dengan detil hasil kajian saya mengenai representasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di surat kabar. Ada dua bagian penting dari bagian ini, pertama mengenai pola-pola pemberitaan surat kabar mengenai Muhammadiyah. Kedua mengenai framing surat kabar tentang Muhammadiyah itu sendiri. Bagian terakhir adalah simpulan yang merupakan pernyataan singkat mengenai permasalahan yang dikaji dalam buku ini.

Saya merasa bersyukur kepada Allah SWT dengan terbitnya buku saya ini. Tentu saja buku sederhana ini tidak mungkin terbit bila tidak ada dukungan dari pihak-pihak lain yang mendukung terbitnya buku ini. Untuk itu dengan rendah hati dan penuh keikhlasan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) yang selalu mendukung dan mendorong pengembangan kemampuan akademis saya. Juga kepada Drs. Daniel Fernandez, M.Si., sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan UHAMKA (saat itu), yang telah mendanai penelitian saya yang akhirnya menjadi buku ini.

Ungkapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Dr. Sri Mustika, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UHAMKA. Saya sengaja menyantumkan kata “Ibu” di depan karena memang sosoknya benar-benar sebagai ibu yang tanpa henti memberikan dukungan dengan tulus kepada saya. Kepada Kang Moeslim (Dr. Moeslim Abdurrahman -alm), sosok seorang guru sejati bagi saya, juga orangtua dan sekaligus sahabat yang luar biasa. “Terima kasih Kang, karena telah menanamkan nilai-nilai intelektualisme dalam diri saya secara begitu kuat dan begitu penting dalam perjalanan hidup saya”. Serta tidak ketinggalan dua orang sahabat Imam Cahyono dan Zaenal Muttaqin, yang bersama-sama merasakan suka dan duka dalam proses pembentukan identitas diri masing-masing. “Tentu kalian masih ingat saat bersama-sama berjuang di Semarang, kan?”. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para kolega saya di FISIP UHAMKA yang menjadi partner dalam diskusi dan pengembangan fakultas agar selalu menjadi

lebih baik. Juga teman-teman di sekretariat FISIP UHAMKA yang mendukung program kerja fakultas.

Tentu terima kasih terdalam saya harus berikan kepada yang paling penting bagi hidup saya, yaitu keluarga saya: Istriku tercinta Mas'adah dan Putri-putriku tersayang yang cantik-cantik: Tajdidah Nur Najmi (Didah), Tazakka Nur Madina (Taza), dan Tamanna Nur Namira (Nana). "Without you all, everything is nothing".

Kepada penerbit buku ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena telah bersedia menerbitkan buku saya ini. Akhir kata, dengan segala kekurangan yang ada semoga buku sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkannya.

Tangerang Selatan, 8 Mei 2014

Penulis

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

1.1 Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah di desa Kauman Yogyakarta. Terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi latar belakang berdirinya Muhammadiyah ketika itu, di antaranya adalah sebagai bentuk pengejawantahan surat Ali Imron 104 yang kandungan isinya tentang suatu kelompok orang yang menyerukan kabaikan dan menolak kemunkaran. Selain itu, adanya kenyataan di tengah masyarakat bahwa pengamalan ajaran Islam telah menyimpang dari sumbernya, yakni Al Qur'an dan As Sunnah.

Faktor lainnya adalah adanya kolonialisme yang menyebabkan keterbelakangan pendidikan masyarakat pribumi. Secara eksternal, lahirnya Muhammadiyah juga karena pengaruh gerakan-gerakan Islam di beberapa Negara, seperti gerakan Wahabi di Saudi, gerakan pembaruan pendidikan di Mesir, pembaruan Islam Turki, dan gerakan pembaruan di India dan Pakistan dengan tokoh-tokohnya seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaludin Al Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha (Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010: 7-13).

Kata "Muhammadiyah" sendiri diartikan sebagai pengikut (Nabi) Muhammad. Menurut Matan, Keyakinan, Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM), Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al Qur'an dan as Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama, adil makmur yang diradhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi (Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 2010: 51)

Beberapa pokok pikiran mengenai gerakan Muhammadiyah adalah pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, berTuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah. Kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya dan satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (bermasyarakat). Keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah. Kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil bila mengikuti jejak (*ittiba'*) perjuangan Nabi Muhammadi SAW. Keenam, perjuangan mewujudkan

pokok-pokok pikiran Muhammadiyah hanya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan berhasil dengan cara berorganisasi (Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 2010: 8-37).

Sejak berdirinya sampai sekarang ini, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan *tajdid* atau pembaruan. *Tajdid* bermakna pemurnian dalam bidang aqidah dan ibadah dan bermakna pengembangan (dinamisasi dan modernisasi) pemikiran dalam bidang muamalah duniawiyah. Sebagai gerakan *tajdid*, Muhammadiyah dalam hal ibadah dan aqidah hanya berpedoman pada al Qur'an dan as-Sunnah dan tidak berpedoman pada satu ulama atau madzhab siapapun. Implikasi dari pemikiran seperti ini maka Muhammadiyah menolak dengan tegas beberapa paham dan ajaran seperti takhayul, bid'ah, dan khurafat, sinkretisme, materialisme, hedonisme dan aliran-aliran lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam muamalah duniawiyah Muhammadiyah berpandangan dan berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip yang dituntunkan al Qur'an dan as-Sunnah.

Menurut Haedar Nashir (2014: 42) para ahli luar dan pakar seperti Alfian dan Deliar Noer sering mengkategorisasikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam reformis atau modernis. Menurut Jainuri (dalam Nashir, 2014: 43) ideologi reformis-modernis ditandai oleh wawasan keagamaan bahwa Islam merupakan nilai ajaran yang memberikan dasar bagi semua aspek kehidupan dan karenanya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Nakamura (dalam Nashir, 2014: 45), wajah modernisme Islam yang ditampilkan Muhammadiyah dengan banyak wajah. Dari jauh terlihat doktriner, tapi dari dekat ada sedikit sistematisasi teologis.

Bila merujuk pada kepribadian Muhammadiyah, maka Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan "Gerakan Islam". Maksud dari istilah gerakan adalah "dakwah Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar* yang ditujukan kepada perseorangan dan masyarakat. Dalam hal ini, Muhammadiyah "menggerakkan" masyarakat menuju tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT (Nashir, 2006: 101).

Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah mempunyai peran untuk melaksanakan dakwah dan *tajdid*. Dakwah dilakukan untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Sedangkan *tajdid* dilakukan dengan melakukan pemurnian sekaligus pembaruan. Menurut Haedar Nashir (2006: xxiv), karakter gerakan Muhammadiyah yang dakwah dan *tajdid* itu bukan semata-mata dakwah, tapi juga pembaruan. Bukan semata-mata pembaruan, tapi juga dakwah. Bukan semata-mata pemurnian, tapi juga pembaruan. Bukan semata-mata pembaruan, tapi juga pemurnian. Pemurnian berarti kembali kepada Islam yang benar-benar murni, atau asli

sebagaimana ajaran al Qur'an dan Sunnah Nabi yang shahihah, dengan mengembangkan ijtihad sesuai dengan manhaj Tarjih.

Itulah yang disebut Haedar Nashir sebagai karekater Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang membedakannya dengan gerakan-gerakan Islam lain di Indonesia dan di dunia. Dengan karakter dakwah dan tajdid itu, maka Muhammadiyah dianggap telah berhasil dalam meneguhkan keyakinan Islam yang kuat dan sekaligus membawa kepada kemajuan hidup. Muhammadiyah, menurut Haedar Nashir (2006: xxvi), telah menjadi gerakan Islam yang memurnikan ajaran Islam sekaligus memajukan kehidupan umat Islam dan umat lain. Inilah yang disebut sebagai Islam yang murni dan berkemajuan.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bertumpu pada dakwah dan tajdid menuntunnya pada kiprah yang lebih luas di berbagai bidang kemasyarakatan, terutama pada bidang sosial. Maka muncul juga konsep selain sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah juga berpredikat sebagai gerakan sosial, terutama terbukti dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, dapatlah disebut bahwa Muhammadiyah pada dasarnya adalah gerakan sosial-Islam. Sebagai gerakan sosial-Islam kiprah Muhammadiyah menjadi lebih luas, isu-isu yang diwacanakan juga lebih beragam dan global. Tidak sebatas menggulirkan wacana-wacana agama, tapi masalah-masalah sosial akibat ketidakadilan global seperti nasib buruh, ketimpangan gender, dan juga masalah nuklir serta lingkungan hidup. Inilah yang kemudian memunculkan gagasan untuk mendorong Muhammadiyah tidak semata-mata sebagai gerakan Islam, tapi sebagai gerakan sosial-Islam Baru (*The New Social-Islamic Movement*), yang lebih transformatif (Ramadhan, 2004: 317).

Menurut Haedar Nashir (2014: 42) para ahli luar dan pakar seperti Alfian dan Deliar Noer sering mengkategorisasikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam reformis atau modernis. Menurut Jainuri (dalam Nashir, 2014: 43) ideologi reformis-modernis ditandai oleh wawasan keagamaan bahwa Islam merupakan nilai ajaran yang memberikan dasar bagi semua aspek kehidupan dan karenanya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Nakamura (dalam Nashir, 2014: 45), wajah modernisme Islam yang ditampilkan Muhammadiyah dengan banyak wajah. Dari jauh terlihat doktriner, tapi dari dekat ada sedikit sistematisasi teologis.

Kini, Muhammadiyah sendiri seperti yang dinyatakan melalui Pernyataan Pikiran Abad Kedua hasil Muktamar ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta lebih menggunakan istilah "Islam Berkemajuan". Menurut Haedar Nashir (2014: 42), Islam Berkemajuan secara substantif mengandung unsur-unsur penting dari reformisme dan modernisme Islam. Secara khusus relatif sama dengan gerakan Islam Progresif.

Pasca Muktamar ke-46 atau Muktamar Satu Abad konsep dan istilah Islam Berkemajuan mulai dikembangkan. Sebagai gerakan Islam Berkemajuan, maka ideology Muhammadiyah berwatak reformis-modernis yang mengandung jiwa pembaruan dan kemajuan sejalan dengan jiwa ajaran Islam. Dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang tercerahkan. Kemajuan dalam Islam adalah kebaikan yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Islam yang berkemajuan memancarkan pencerahan bagi kehidupan. Secara ideologis Islam yang berkemajuan untuk pencerahan merupakan bentuk transformasi surat Al Maun untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara actual dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi umat manusia (Nashir, 2014: 53).

1.2 Muhammadiyah dan Media Massa

Bagaimana representasi Muhammadiyah sendiri dalam media massa berkaitan dengan identitasnya sebagai gerakan Islam? Representasi pada dasarnya merujuk pada bagaimana seseorang, suatu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam media (Eriyanto, 2001: 113). Pada konteks ini, apakah Muhammadiyah sebagai suatu kelompok atau organisasi yang beridentitas sebagai gerakan Islam ditampilkan sebagaimana mestinya di media massa?

Berdasarkan studi yang dilakukan berkaitan dengan representasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di media (surat kabar) yakni pertama berkaitan dengan isu-isu keislaman berkaitan dengan hubungan antarumat beragama, dan kedua mengenai wacana-wacana Islam pada kampanye Pilpres 2009, dapat ditarik temuan-temuan berkaitan dengan representasi Muhammadiyah di media massa. Pada studi yang pertama, berkaitan dengan wacana yang dikembangkan adalah berhubungan dengan isu pentingnya harmoni dalam hubungan antarumat beragama, di sini Muhammadiyah sebagai organisasi Islam ikut mendorong terciptanya hubungan baik antarumat beragama di Indonesia. Sedangkan mengenai pelibat atau komunitasnya adalah

Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang juga aktif dalam berbagai forum kerukunan antarumat beragama.¹

Pada studi yang kedua, temuan-temuan pentingnya di antaranya adalah Muhammadiyah sebagai organisasi atau gerakan Islam yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden ketika itu, yakni Jusuf Kalla dan Wiranto. Representasi lainnya adalah, begitu kuatnya peran Din Syamsuddin sebagai tokoh Muhammadiyah yang menjadi komunikator politik satu-satunya dari Muhammadiyah, dan selalu mewakili suara Muhammadiyah di media massa. Ada kesan kuat personifikasi dan identifikasi antara Din Syamsuddin dengan Muhammadiyah.²

Dari kedua studi di atas menunjukkan sebenarnya representasi Muhammadiyah di media massa tidaklah sebagaimana mestinya. Artinya sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah lebih banyak ditampilkan dalam aspek hubungannya dengan politik atau kekuasaan. Selain itu, kuat dominasi Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga merepresentasikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang sangat tergantung pada sosok ketua umumnya. Padahal selama ini jelas bahwa prinsip kepemimpinan dalam Muhammadiyah adalah kolektif-kolegial.

Sebagai gerakan Islam yang sangat besar, berpengaruh, dan berpengalaman, liputan mengenai Muhammadiyah di media massa dapat dikatakan tidak begitu menonjol. Muhammadiyah juga tidak terlalu dominan di media mengambil peran sebagai *news maker* berkaitan dengan isu-isu strategis seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan isu-isu mengenai globalisme. Muhammadiyah diliput media hanya mengenai isu yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan seperti penentuan awal bulan puasa atau hari Raya Idul Fitri, atau sebatas pada pernyataan-pernyataan sekilas dari Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengenai isu-isu yang berkembang di Indonesia dan dunia, terutama dunia Islam.

Meskipun demikian, ada juga masalah-masalah yang disorot Muhammadiyah yang kemudian diberitakan media massa. Pada pertengahan Maret 2010 misalnya, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram rokok yang spontan memicu berbagai reaksi, baik mendukung maupun menentang dari masyarakat secara luas. Isu fatwa haram rokok ini kemudian menjadi isu nasional yang dimuat di berbagai media massa. Peliputan yang agak menonjol mengenai Muhammadiyah juga dapat dilihat pada pemberitaan media massa pada Pemilu Presiden 2009

¹ Lihat, hasil penelitian Said Ramadhan, *Peran Media Massa dalam Internalisasi Nilai-nilai Agama untuk Membina Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia (Analisis Isi Surat Kabar Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Suara Pembaruan)*, Hasil Penelitian, Litbang, Depag RI, Jakarta, 2009.

² Lihat, hasil penelitian Said Ramadhan, *Wacana Keislaman selama Kampanye Pemilihan Presiden 2009 dalam Pemberitaan Surat-kabar (Analisis Semiotik Hassan-Halliday mengenai Berita-berita Keislaman di Surat-kabar Kompas, Republika, dan Media Indonesia)*, Hasil Penelitian, FISIP UHAMKA, Jakarta, 2010.

yang lalu. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh penulis mengenai berita-berita keislaman selama pemilihan presiden dan wakil presiden 2009 yang lalu, liputan mengenai Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Din Syamsuddin sebagai komunikator politik Muhammadiyah di berbagai media cukup menonjol, sekaligus menunjukkan dalam isu-isu tertentu Muhammadiyah mampu tampil sebagai *opinion maker*.

Salah satu isu yang menarik media massa mengenai Muhammadiyah adalah berkaitan dengan Muktamar Muhammadiyah. Misalnya pada pada muktamar ke-45 Muhammadiyah di Malang, Jawa Timur, 3-8 Juli 2005 dapat diamati bahwa wacana yang menonjol, baik di kalangan muktamirin (peserta muktamar) maupun di media massa adalah mengenai persaingan atau konflik internal antara tokoh-tokoh kubu fundamentalis-konservatif dan kubu liberal-progresif. Seperti yang digambarkan oleh Intelektual Muda Muhammadiyah, Ahmad Najib Burhani, bahwa pada muktamar tersebut isu yang berkembang adalah mengenai pro-kontra Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) yang dianggap liberal, dan juga mengenai tersisihnya tokoh-tokoh Muhammadiyah yang selama ini dianggap liberal seperti Amin Abdullah, Munir Mulkan, dan Moeslim Abdurrahman dari jajaran pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Secara lebih mendalam Pradana Boy ZTF, mengamati bahwa Muktamar ke-45 Muhammadiyah di Malang menghasilkan pergeseran pemikiran di Muhammadiyah dari moderat menuju pemikiran konservatisme. Menurutnya, pergeseran itu dapat dilihat dari isu dan peristiwa yang berkembang selama muktamar. Pertama, adanya penolakan terhadap isu-isu kontemporer seperti multikulturalisme dan gender dari muktamirin. Kedua, terpilih Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dilihat sebagai kemenangan kelompok konservatif. Ketiga, tergesernya para pemikir Muhammadiyah yang progresif dari struktur kepengurusan Muhammadiyah (2009: 1).

Implikasi dari hasil Muktamar Malang itu, langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan representasi Muhammadiyah di ranah publik. Katakanlah karena yang “menang” pada muktamar itu adalah kubu konservatif, maka isu-isu atau wacana yang dilontarkan Muhammadiyah selama ini yang diliput oleh media menunjukkan atau mewakili pemikiran tokoh Muhammadiyah yang dominan saat ini. Penolakan terhadap isu-isu kontemporer sebagaimana disebutkan oleh Boy di atas salah satu bukti relevansi itu. Apakah yang direpresentasikan media massa mengenai Muhammadiyah selama ini dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di mata publik? Meskipun bukan satu-satunya indikator, nampaknya sulit menghindari pembingkaiian atau framing yang dibentuk oleh media massa mengingat betapa kuatnya pengaruh media massa saat ini.

Begitupun pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-46 di Yogyakarta, pada 3-8 Juli 2010 di Yogyakarta. Salah satu isu utama yang hendak digulirkan adalah peneguhan ideologi Muhammadiyah di tengah arus perubahan dan tantangan globalisasi saat ini. Meski demikian, sepertinya muktamar Muhammadiyah kali ini akan dijadikan momentum penataan organisasi secara internal, terutama dalam merespon dinamika sosial-politik di Indonesia akhir-akhir ini, daripada melihat dan menyikapi isu-isu global yang juga berkembang. Hal itu terlihat dari jargon yang didengungkan selama ini jelang satu abad Muhammadiyah, dan tentu saja karena muktamar kali ini diselenggarakan di Yogyakarta, kota kelahiran Muhammadiyah satu abad yang lalu.

Pada muktamar ke-46 Muhammadiyah di Yogyakarta sangat menarik untuk diikuti dinamikanya, terutama dari kacamata media massa. Sebagai gerakan Islam yang besar dan yang dianggap moderen, serta berpengalaman (karena sudah tua), tajdid apa lagi yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah terutama dalam merespon perubahan-perubahan sosial, dan dinamika masyarakat internasional dewasa ini. Termasuk yang menarik adalah bagaimana representasi Muhammadiyah di media massa, terutama mengamati bagaimana liputan-liputan media menjelang dan selama muktamar ke-46 tersebut.

Buku ini memfokuskan penelaahan bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ditampilkan di media massa, yang merupakan arena pertarungan identitas. Identitas seperti apa yang akan ditampilkan oleh media mengenai Muhammadiyah? Apakah identitas Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu dan modernis masih dianggap layak disematkan untuk Muhammadiyah saat ini mengingat kiprahnya yang dalam merespon isu-isu baru sudah mulai lambat dan tertinggal dari organisasi lain? Atau akan muncul gagasan segar dan terobosan cemerlang yang dapat dibingkai dan dijadikan momentum lahirnya Muhammadiyah jilid baru yang lebih berkemajuan.

1.2 Metode

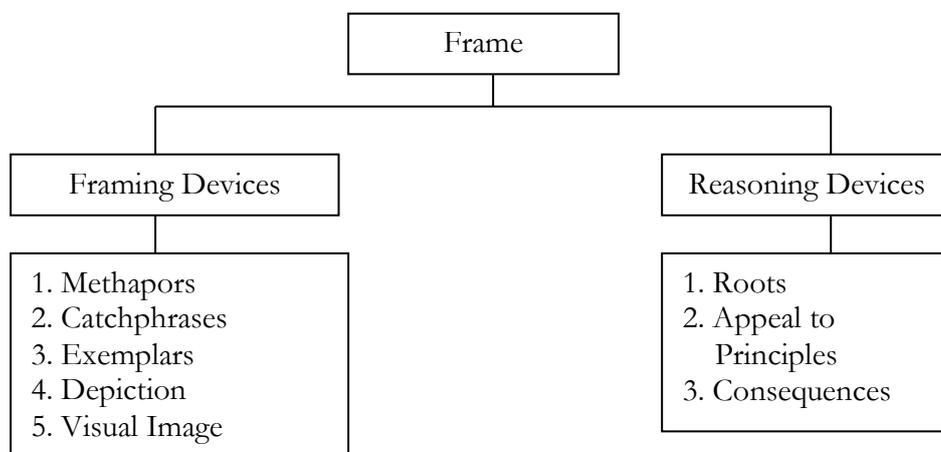
Buku ini merupakan hasil penelitian mengenai pemberitaan media massa (surat kabar) mengenai Muhammadiyah selama Muktamar ke-46 di Yogyakarta tahun 2010. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana kedudukan penelitian didasarkan atas interpretasi subyektif dan temuan penelitian terikat konteks. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan (Kriyantono, 2006: 57).

Sedangkan metode yang digunakan adalah analisis framing. Menurut Gamson dan Modigliani (dalam Sobur, 2001: 162), framing adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang

terorganisir sedemikian rupa untuk menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek suatu wacana. Dalam studi komunikasi, framing dipakai untuk membedah cara-cara pandang pembuat teks terhadap suatu realitas atau untuk memahami ideologi media yang mempengaruhi konstruksi fakta yang dibuat pembuat teks. Dengan kata lain framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Berita sendiri dapat diartikan sebagai laporan aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik atau penting, atau keduanya, bagi sejumlah besar orang (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2007: 39).

Surat kabar yang dipilih adalah surat kabar nasional yang terbit di Jakarta. Secara purposive (sengaja) ditentukan lima surat kabar nasional untuk diketahui bagaimana pola dan framingnya berkaitan dengan Muhammadiyah sebagai gerakan. Kelima surat kabar itu adalah Kompas, Media Indonesia, Republika, Koran Tempo, dan Suara Pembaruan. Pemilihan surat kabar tersebut berdasarkan asumsi bahwa mereka mempunyai tiras yang relatif banyak, dengan segmen yang tersebar. Analisis pada surat kabar dilakukan dari 1-15 Juli 2010 dengan pertimbangan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta, tanggal 2-8 Juli 2010, sehingga peliputan mengenai Muhammadiyah pada periode edisi tersebut relatif lebih banyak dibandingkan dengan waktu-waktu lain.

Untuk analisis datanya menggunakan analisis framing model Gamson dan Modigliani. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua tingkatan, yaitu analisis teks dengan menggunakan analisis framing model Gamson dan Modigliani sebagai berikut:



Gambar 1: Analisis Framing model Gamson dan Modigliani (sumber: Eriyanto, 2002: 225).

BAGIAN 2

BINGKAI MUHAMMADIYAH DALAM SURAT KABAT

3.1. Pola-pola Pemberitaan Surat Kabar mengenai Muhammadiyah

Pada dasarnya pola-pola isi media (*patterns of media content*) dapat diartikan sebagai kecenderungan yang terus-menerus suatu media dalam memberitakan sebuah peristiwa. Pola-pola isi media selalui dikaitkan dengan ide-ide, orang-orang, aktivitas-aktivitas, dan pandangan-pandangan yang paling sering dimunculkan oleh media, dan dalam gaya atau model seperti apa pandangan tersebut ditampilkan. Pola-pola media di sini berkaitan dengan siapa yang kita lihat di media? Bagaimana ciri-ciri kepribadian mereka? Dari sistem sosial mana mereka berasal? Apa perilaku yang mereka tunjukkan? Bagaimana mereka ditampilkan, hubungannya dengan masyarakat lain?

Secara lebih sistematis Shoemaker dan Reese (1996: 41-42) menyebutkan beberapa pola isi media, di antaranya adalah pertama, bias politik (*political bias*). Menurut McQuail (dalam Shoemaker dan Reese, 1996:43), bias dianggap sebagai kecenderungan secara konsisten untuk menyimpang atau meninggalkan kebenaran obyektif. Dengan menggunakan dua konsep yang dihubungkan dengan obyektifitas, McQuail menyebutkan ada “tipologi bias berita” yaitu pertama bias terbuka dan bias tersembunyi, dan kedua bias yang disengaja dan tidak disengaja.

Kedua tipologi tersebut menghasilkan empat jenis bias berita yang meliputi: pertama, bias partisan (*partisanship*), yaitu keberpihakan editorial (*editorial endorsements*) kepada salah seorang kandidat politik, kolom, opini, dan periklanan, di mana kasus-kasus tersebut merupakan bias yang terbuka dan disengaja. Kedua, propaganda, yakni bias yang disengaja tapi relatif tersembunyi dan sulit diidentifikasi dalam sebuah berita. Ketiga, *unwitting bias*, yaitu bias yang tanpa disengaja seperti pemilihan topik yang dianggap layak untuk dikadikan berita (pemilihan berita). Keempat, bias ideologi, yakni merupakan bias yang disembunyikan dan ditanamkan dalam sebuah teks.

Pola-pola isi media yang kedua adalah berkaitan dengan perilaku. Perilaku-perilaku yang ditampilkan di media massa adalah perilaku kekerasan (*violence*). Beberapa studi tentang kekerasan di media telah sering dilakukan untuk mengetahui pengaruh kekerasan di media dengan perilaku agresif masyarakat. Hasil studi Gerbner dan kawan-kawan antara tahun 1967-1985 menunjukkan sebesar 70% media menampilkan tayangan kekerasan. Hasil studi mereka juga menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang positif antara tayangan kekerasan di media dengan perilaku kekerasan di masyarakat. Bahkan dalam penelitian mereka berikutnya mereka menyimpulkan bahwa pengaruh kekerasan dalam pemberitaan telah menyebar dan dirasakan oleh semua elemen

masyarakat (*mainstreaming*), tanpa membedakan jenis kelamin, agama, tempat tinggal, etnis, usia dan status sosial ekonomi masyarakat (Gerbner, dkk, 1979: 177-196).

Pola-pola isi media yang ketiga adalah berkaitan dengan sumber berita dan isu berita. Gans dalam analisisnya terhadap *CBS*, *NBC*, *Newsweek*, dan *Time* menyebutkan bahwa berita-berita didominasi oleh sumber berita (aktor) “yang dikenal” (*knowns*), yakni sebesar 71% di televisi dan 76% di majalah. Sedangkan sumber-sumber berita yang aktornya tidak dikenal (*unknowns*) yakni 21% di televisi dan 18% di majalah. (Gans, 1979: 9). Selain aktor atau pelaku berita, Studi Gans juga menganalisis kegiatan-kegiatan yang mendominasi pemberitaan (isu berita) di televisi dan majalah (Gans, 1976: 16).

Sementara itu, Sigal dalam studinya terhadap *Washington Post* dan *New York Times* menemukan bahwa pegawai merupakan sumber berita yang diutamakan oleh media, baik televisi maupun majalah, yakni sebesar 60% berita-berita diambil dari laporan pegawai, konferensi pers, dan *press release*. Hal ini menurut Sigal, karena sumber dari pegawai (*officials*) dianggap lebih akurat (Sigal, 1973: 121). Kecenderungan bahwa pegawai pemerintah atau polisi lebih sering digunakan sebagai sumber juga disebabkan karena tidak hanya mereka mudah dijumpai untuk wawancara, tapi juga karena jurnalis dan editor percaya bahwa mereka mempunyai sesuai yang penting untuk disampaikan (Shoemaker dan Reese, 1996: 180).

Sedangkan pola-pola isi media yang terakhir adalah pola-pola geografi. Pola geografi ini dibagi menjadi pola domestik dan pola internasional yang berkaitan dengan korespondensi dan ulasan berita. Pola-pola isi media lainnya adalah pola demografis. Menurut Greenberg (dalam Shoemaker dan Reese, 1996: 49) pola ini berkaitan dengan suatu jabatan atau pekerjaan. Kaum profesional lebih sering ditampilkan di televisi daripada staf administrasi dan pekerja jasa. Kelas menengah atas juga lebih sering diekspose oleh media daripada kelas menengah bawah. Media juga digambarkan telah melakukan diskriminasi untuk lapisan usia dalam masalah jam penayangan. Selain juga masalah rasial antara kulit putih dan kulit hitam dan diskriminasi gender juga cukup mendominasi dalam beberapa tayangan media.

Dalam penelitian ini, ada empat pola pemberitaan yang ditampilkan berkaitan dengan pemberitaan surat kabar mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam selama Muktamar ke-46 di Yogyakarta. Pertama pola frekuensi, yaitu jumlah berita surat kabar mengenai Muhammadiyah selama muktamar. Kedua adalah pola sumber berita, yakni sumber-sumber berita yang digunakan surat kabar dalam pemberitaannya mengenai Muhammadiyah selama muktamar. Ketiga pola kecenderungan (penonjolan) isu, yaitu isu-isu yang dianggap penting surat kabar berdasarkan frekuensi beritanya mengenai Muhammadiyah selama muktamar.

Keempat pola kecenderungan isi, yaitu berkaitan dengan isi berita surat kabar mengenai Muhammadiyah selama muktamar, apakah positif, negatif, atau netral.

Pada kategori jumlah berita, selama periode penelitian yakni 1-13 Juli 2010, secara keseluruhan terdapat 62 berita mengenai Muhammadiyah. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.1, jumlah berita mengenai Muhammadiyah masing-masing surat kabar berbeda. Dari total berita, Republika merupakan surat kabar yang paling banyak memberitakan Muhammadiyah, yakni 22 berita (35%). Sedangkan surat kabar yang paling sedikit memberitakan Muhammadiyah adalah Suara Pembaruan, yaitu hanya 7 berita (11%). Sedangkan Kompas 13 berita (21%), Media Indonesia 11 berita (18%), dan Koran Tempo 9 berita (15%).

Dari kecenderungan pola frekuensi tersebut menunjukkan bahwa Republika merupakan surat kabar yang paling menganggap penting isu mengenai Muhammadiyah karena jumlah frekuensi beritanya paling banyak. Sebaliknya, Suara Pembaruan merupakan surat kabar dari segi frekuensi pemberitaannya paling tidak menganggap penting isu mengenai Muhammadiyah. Pola yang berbeda dari Republika dan Suara Pembaruan tersebut dapat dijelaskan dari aspek latar belakang kedua surat kabar tersebut. Republika merupakan surat kabar yang memunyai latar belakang Islam, pemberitaannya banyak mengenai isu-isu keislaman, termasuk pemberitaannya mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Sedangkan Suara Pembaruan merupakan surat kabar dengan latar belakang non-Islam sehingga dalam pemberitaannya tidak banyak mengulas mengenai isu-isu keislaman, termasuk mengenai Muhammadiyah sebagai organisasi Islam. Sedangkan ketiga surat kabar lainnya yakni Kompas, Koran Tempo, dan Media Indonesia dari aspek jumlah pemberitaannya mengenai Muhammadiyah lebih mengikuti isu yang berkembang di masyarakat.

Tabel 2.1. Frekuensi Pemberitaan Surat Kabar mengenai Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam selama Muktamar ke-46

No	Nama Surat Kabar	Jumlah (%)
1	Kompas	13 (21%)
2	Koran Tempo	9 (15%)
3	Media Indonesia	11(18%)
4	Republika	22 (35%)
5	Suara Pembaruan	7 (11%)
	J u m l a h	62

Sedangkan berkaitan dengan pola-pola sumber berita yang digunakan surat kabar dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah masing-masing surat kabar terlihat mempunyai kecenderungan pola yang beragam. Seperti yang terlihat pada tabel 2.2, secara keseluruhan

tercatat 217 sumber berita yang digunakan surat kabar dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah. Dari jumlah tersebut, sumber berita yang paling banyak digunakan surat kabar adalah dari PP Muhammadiyah, yakni sebanyak 69 sumber (32%), kemudian dari pengamat/pakar sebanyak 27 (12%), tokoh Muhammadiyah sebanyak 25 sumber (11%), dan panitia muktamar sebanyak 21 sumber (10%).

Kecenderungan ini menunjukkan surat kabar lebih mengandalkan informasi dari kalangan PP Muhammadiyah dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah, terutama berita-berita mengenai peran Muhammadiyah karena dianggap lebih memunyai kredibilitas. Selain itu, surat kabar juga menggunakan pandangan para pakar/pengamat dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan surat kabar juga ingin menyampaikan informasi mengenai Muhammadiyah dari sudut pandang yang lain sebagai kontrol atau penyeimbang. Meskipun sumber yang dominan tetap dari kalangan internal Muhammadiyah.

Bila dilihat dari pola sumber berita masing-masing surat kabar maka terlihat surat kabar memunyai kesamaan dan perbedaan. Hal itu terlihat dari kecenderungannya yang meskipun jumlah beritanya berbeda semua surat kabar menggunakan sumber berita paling banyak dari para Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Namun masing-masing surat kabar cenderung berbeda dalam penggunaan sumber berita berikutnya. Kompas misalnya, jumlah total sumber berita yang digunakan sebanyak 38 sumber atau 18% dari total sumber berita (217). Dari jumlah tersebut sumber berita yang paling banyak digunakan adalah dari PP Muhammadiyah sebanyak 9 sumber (24%), sama dengan jumlah sumber dari pengamat/pakar, yakni 9 sumber (24%), kemudian dari tokoh Muhammadiyah sebanyak 7 sumber (18%).

Pola sumber berita Kompas di atas agak berbeda dengan Koran Tempo. Dari 31 sumber berita yang digunakan dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah, memang yang paling banyak adalah sumber dari PP Muhammadiyah, yakni 12 sumber (39%), tapi sumber berita yang paling banyak berikutnya adalah dari partai politik sebanyak 5 sumber (16%), sama besarnya dengan sumber dari tokoh Muhammadiyah, yakni 5 sumber (16%). Sedangkan Media Indonesia, dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah menggunakan 32 sumber (15%). Sumber berita yang paling dominan oleh Media Indonesia juga dari PP Muhammadiyah, yaitu sebanyak 10 sumber (31%), kemudian sumber dari pengamat/pakar sebanyak 5 sumber (16%), dan dari sumber dari pejabat negara sebanyak 4 sumber (13%).

Adapun Republika sumber berita yang digunakan dalam pemberitaannya mengenai Muhammadiyah berjumlah 81 sumber (37%), paling banyak dari surat kabar yang lain. Sama halnya dengan Kompas, Koran Tempo, dan Media Indonesia, sumber berita yang paling banyak

digunakan Republika adalah dari kalangan PP Muhammadiyah, yakni 27 sumber (33%), kemudian sumber dari panitia muktamar sebanyak 15 sumber (19%), dan dari organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah seperti Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), sebanyak 7 sumber (9%).

Sedangkan Suara Pembaruan, dari 35 sumber berita yang digunakan, sama dengan keempat surat kabar sebelumnya, sumber yang paling banyak digunakan adalah dari PP Muhammadiyah, yakni 11 sumber (31%). Sumber berita yang juga relatif banyak digunakan Suara Pembaruan adalah dari kalangan partai politik, sebanyak 7 sumber (20%), dan sumber dari tokoh Muhammadiyah sebanyak 6 sumber (17%).

Dari pola sumber berita surat kabar di atas dapat dianalisis dengan mengaitkannya dengan isu yang ditonjolkan oleh masing-masing surat kabar. Kompas misalnya banyak menampilkan sumber berita dari kalangan pengamat/pakar, selain dari PP Muhammadiyah sendiri. Hal ini menunjukkan pola pemberitaan Kompas mengenai Muhammadiyah cenderung bersifat “menilai” atau “mengkritisi” keberadaan Muhammadiyah selama ini, seperti dalam isu mengenai regenerasi Muhammadiyah yang dianggap oleh Kompas telah gagal. Pola pemberitaan Kompas ini berbeda dengan pola pemberitaan Koran Tempo yang dalam pemberitaannya mengenai Muhammadiyah banyak dikaitkan dengan politik. Salah satunya berkaitan dengan masalah kontroversi pencalonan Muchdi PR sebagai salah satu calon ketua PP Muhammadiyah.

Sedangkan pola pemberitaan Media Indonesia mengenai Muhammadiyah bila dilihat dari pola sumber beritanya terlihat tidak jauh berbeda dengan Kompas. Hanya saja selain didominasi oleh sumber dari PP Muhammadiyah dan pengamat/pakar, Media Indonesia juga banyak menggunakan sumber dari pejabat negara. Hal ini menunjukkan pola pemberitaan Media Indonesia mengenai Muhammadiyah lebih dikaitkan dengan masalah hubungan antara Muhammadiyah dan negara, seperti masalah mengenai kritik Muhammadiyah terhadap pemerintah. Adapun pola pemberitaan Republika agak jauh berbeda dengan surat kabar lain. Republika lebih banyak mengutip pernyataan sumber dari panitia muktamar dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah. Kecenderungan ini menunjukkan Republika lebih banyak memberitakan mengenai Muhammadiyah yang dikaitkan dengan pelaksanaan muktamar, seperti bursa pencalonan ketua umum, pemilihan, dan penghitungan suara, serta pelaksanaan muktamar itu sendiri.

Adapun pola pemberitaan Suara Pembaruan mengenai Muhammadiyah dilihat dari kecenderungan penggunaan sumber berita cenderung sama dengan Koran Tempo yang banyak memberitakan Muhammadiyah dalam hubungannya dengan partai politik. Tetapi Suara

Pembaruan tidak khusus memberitakan kontroversi pencalonan Muchdi PR seperti yang dilakukan Koran Tempo, namun lebih fokus pada kecenderungan Muhammadiyah untuk berpolitik di masa depan.

Tabel 2.2. Sumber-sumber Berita Surat Kabar dalam Pemberitaan mengenai Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam selama Muktamar ke-46

Kategori Sumber	Nama Surat Kabar					Jumlah
	Kompas	Koran Tempo	MI	Repub Lika	Suara Pembaruan	
Pimpinan Pusat	9 (24%)	12 (39%)	10 (31%)	27 (33%)	11 (31%)	69 (32%)
Pengamat/Pakar	9 (24%)	3 (10%)	5 (16%)	6 (7%)	4 (11%)	27 (12%)
Tokoh Muhammadiyah	7 (18%)	5 (16%)	3 (9%)	4 (5%)	6 (17%)	25 (11%)
Panitia Muktamar	2 (5%)	0	2 (6%)	15 (19%)	2 (6%)	21 (10%)
Pejabat Negara	3 (8%)	2 (6%)	4 (13%)	3 (4%)	1 (3%)	13 (6%)
Partai Politik	0	5 (16%)	1 (3%)	0	7 (20%)	13 (6%)
Ortom (Pemuda/ IPM/IMM)	1 (3%)	0	3 (9%)	7 (9%)	0	11 (5%)
Ortom (Aisyiyah/NA)	2 (5%)	0	1 (3%)	5 (6%)	2 (6%)	10 (5%)
Pimpinan Wilayah/Cabang	0	2 (6%)	1 (3%)	6 (7%)	1 (3%)	10 (5%)
Kader Muhammadiyah	3 (8%)	0	0	6 (7%)	1 (3%)	10 (5%)
AUM (PTM)	2 (5%)	0	1 (3%)	2 (2%)	0	5 (2%)
Warga	0	2 (6%)	1 (3%)	0	0	3 (1%)
Jumlah	38 (18%)	31 (14%)	32 (15%)	81 (37%)	35 (16%)	217

Pola sumber berita yang digunakan surat kabar dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah dapat juga dilihat dari kategori sumber berita kalangan Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah. Berdasarkan kategorisasi ini, seperti yang terlihat pada tabel 3.3, secara keseluruhan surat kabar lebih banyak menggunakan sumber berita dari kalangan internal Muhammadiyah sendiri, yakni sebanyak 160 sumber (74%), daripada kalangan non-Muhammadiyah yang berjumlah 57 sumber (26%). Kecenderungan ini disebabkan kategori sumber berita dari kalangan Muhammadiyah memang lebih banyak, mulai dari PP Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, Ortom, kader Muhammadiyah, sampai pimpinan wilayah dan cabang Muhammadiyah. Sedangkan kategori sumber dari kalangan non-Muhammadiyah lebih sedikit, yakni pejabat negara, partai politik, dan warga.

Sedangkan bila dilihat dari kecenderungan masing-masing surat kabar, terlihat semua surat kabar memang lebih banyak menggunakan sumber berita dari kalangan Muhammadiyah daripada dari kalangan non-Muhammadiyah, tapi dengan frekuensi yang berbeda. Koran Tempo merupakan surat kabar yang relatif dekat perbandingan penggunaan sumber berita dari kalangan Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah, yakni 18 sumber (58%) dari kalangan Muhammadiyah dan 13 sumber (42%) dari kalangan non-Muhammadiyah. Sebaliknya, Republika merupakan surat kabar yang perbandingan penggunaan sumber berita dari kalangan Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah sangat jauh. Republika menggunakan sumber berita dari kalangan Muhammadiyah sebanyak 72 sumber (89%) dan sumber dari non-Muhammadiyah sebanyak 9 sumber (11%). Adapun ketiga surat kabar yang lain, Kompas, Media Indonesia, dan Suara Pembaruan berada di posisi sedang, tidak sedekat Koran Tempo dan tidak terlalu jauh seperti Republika.

Kecenderungan surat kabar dalam penggunaan sumber berita yang lebih banyak menggunakan sumber berita dari kalangan internal Muhammadiyah daripada kalangan non-Muhammadiyah karena surat kabar lebih banyak menyoroti isu-isu mengenai peran dan perkembangan Muhammadiyah dari pandangan internal Muhammadiyah sendiri. Implikasinya pemberitaan mengenai Muhammadiyah akan cenderung normatif atau netral, meskipun beberapa kalangan internal Muhammadiyah juga mengkritisi Muhammadiyah, terutama dari kader-kader muda Muhammadiyah, tapi jumlahnya tidak cukup banyak.

Tabel 2.3. Sumber-sumber Berita Surat Kabar dalam Pemberitaan mengenai Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam selama Mukhtar ke-46 Berdasarkan Kategori Kalangan Muhammadiyah dan Non-Muhammadiyah

Kategori Sumber	Nama Surat Kabar					Jumlah
	Kompas	Koran Tempo	MI	Republika	Suara Pembaruan	
Kalangan Muhammadiyah	26 (68%)	18 (58%)	21 (67%)	72 (89%)	23 (66%)	160 (74%)
Non-Muhammadiyah	12 (32%)	13 (42%)	11 (33%)	9 (11%)	12 (34%)	57 (26%)
Jumlah	38	31	32	81	35	217

Bila dilihat dari nama-nama sumber dari kalangan internal Muhammadiyah, seperti yang terlihat pada tabel 3.4, secara keseluruhan, maka Din Syamsuddin merupakan sumber berita yang paling banyak digunakan oleh surat kabar dalam pemberitaannya mengenai Muhammadiyah

dibanding kalangan atau tokoh Muhammadiyah lainnya. Din Syamsuddin dikutip sebagai sumber berita sebanyak 23 kali (14%), kemudian disusul oleh Haedar Nashir sebanyak 12 (8%), Ahmad Syafii Maarif, 10 (6%), M. Amien Rais, 10 (6%), Abdul Mu'ti, 8 (5%), Yunahar Ilyas, 8 (5%), Rosyad Soleh, 7 (4%), Budi Setiawan, 6 (4%), Agung Danarto, 5 (3%), Trias Setawati, 4 (3%), A. Malik Fadjar, 4 (3%), dan Asep Purnama Bachtiar, 4 (3%).

Nama-nama sumber berita di atas merupakan representasi sumber berita kalangan internal Muhammadiyah yang dianggap oleh surat kabar memunyai kredibilitas sebagai sumber berita mengenai Muhammadiyah. Din Syamsuddin dan Haedar Nashir mewakili ketua umum dan sekretaris umum PP Muhammadiyah, representasi Muhammadiyah poros Jakarta dan Yogyakarta, sekaligus sebagai indikator adanya rivalitas atau persaingan memerebutkan ketua umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015. Sedangkan Ahmad Syafii Maarif dan M. Amien Rais merupakan tokoh Muhammadiyah, mantan ketua umum PP Muhammadiyah periode sebelumnya yang masih sangat berpengaruh. Abdul Mu'ti, Yunahar Ilyas, dan Agung Danarto adalah anggota PP Muhammadiyah yang terpilih, mereka merupakan kandidat kuat ketua umum PP Muhammadiyah masa depan. Adapun Rosyad Soleh dan Budi Setiawan merupakan ketua dan sekretaris pelaksana muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta. Trias Setiawati mewakili unsur perempuan di Muhammadiyah, A Malik Fadjar mewakili tokoh senior Muhammadiyah, dan Asep Purnama Bachtiar representasi dari kader muda Muhammadiyah.

Sedangkan bila dilihat dari pola masing-masing surat kabar menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda dengan yang secara keseluruhan. Din Syamsuddin merupakan sumber berita yang paling banyak digunakan surat kabar dari kalangan Muhammadiyah dibanding dengan sumber-sumber berita lainnya. Hal itu tidak terlepas dari ketokohnya yang dianggap beberapa kalangan cenderung *one man show*. Sumber berita berikutnya masing-masing surat kabar relatif berbeda, tetapi tidak terlalu menonjol perbedaannya. Data menarik dari tabel 5.4 adalah tidak digunakannya sama sekali Haedar Nashir oleh Kompas sebagai sumber berita dalam pemberitaannya mengenai Muhammadiyah, padahal ia adalah sekretaris umum PP Muhammadiyah. Demikian juga dengan Suara Pembaruan yang hanya menggunakan Haedar Nashir sebagai sumber berita satu kali. Haedar Nashir banyak digunakan sebagai sumber di Republika, dan juga Koran Tempo dan Media Indonesia meski tidak sebanyak Republika.

Tabel 2.4. Nama-nama Sumber Berita Surat Kabar dalam Pemberitaan mengenai Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam selama Muktamar ke-46 dari Kalangan Muhammadiyah

Kategori Sumber	Nama Surat Kabar					Jumlah
	Kompas	Koran Tempo	MI	Republika	Suara Pembaruan	
Din Syamsuddin	3 (12%)	3 (17%)	5 (24%)	8 (11%)	4 (17%)	23 (14%)
Haedar Nashir	0	2 (11%)	3 (14%)	6 (8%)	1 (4%)	12 (8%)
A Syafii Maarif	2 (8%)	2 (11%)	1 (5%)	3 (4%)	2 (9%)	10 (6%)
Amin Rais	2 (8%)	3 (17%)	2 (10%)	1 (1%)	2 (9%)	10 (6%)
Abdul Mu'ti	2 (8%)	1 (6%)	0	3 (4%)	2 (9%)	8 (5%)
Yunahar Ilyas	1 (4%)	1 (6%)	1 (5%)	4 (6%)	1 (4%)	8 (5%)
Rosyad Soleh	2 (8%)	0	0	4 (6%)	1 (4%)	7 (4%)
Budi Setiawan	0	0	1 (5%)	4 (6%)	1 (4%)	6 (4%)
Agung Danarto	1 (4%)	0	1 (5%)	2 (3%)	1 (4%)	5 (3%)
Trias Setiawati	1 (4%)	0	0	2 (3%)	1 (4%)	4 (3%)
Malik Fadjar	1 (4%)	1 (6%)	0	1 (1%)	1 (4%)	4 (3%)
Asep Purnama B	2 (8%)	1 (6%)	0	0	1 (4%)	4 (3%)
Andi R Wijaya	0	0	0	3 (4%)	0	3 (2%)
Goodwil Zubir	0	1 (6%)	0	2 (3%)	0	3 (2%)
Izzul Muslimin	1 (4%)	0	0	2 (3%)	0	3 (2%)
M Suyuti	0	0	0	2 (3%)	1 (4%)	3 (2%)
Nadjib Hamid	0	1 (6%)	0	2 (3%)	0	3 (2%)
Syafii Anwar	1 (4%)	0	0	0	2 (9%)	3 (2%)
Andar Nubowo	0	1 (6%)	1 (5%)	0	1 (4%)	3 (2%)
Siti Noordjannah	1 (4%)	0	0	1 (1%)	0	2 (1%)
Abidah Muflihati	0	0	1 (5%)	1 (1%)	0	2 (1%)
M Muqoddas	0	1 (6%)	0	1 (1%)	0	2 (1%)
Sudiby Markas	1 (4%)	0	0	1 (1%)	0	2 (1%)
Munir Mulkhan	1 (4%)	0	0	1 (1%)	0	2 (1%)
Busyro Muqoddas	1 (4%)	0	0	1 (1%)	0	2 (1%)
Fani Dirgantara	0	0	0	2 (3%)	0	2 (1%)
Sumber Lain (@1)	3 (12%)	0	5 (24%)	14 (19%)	1 (4%)	23 (14%)
Jumlah	26 (16%)	18(11%)	21 (13%)	72 (45%)	23 (14%)	160

Pola pemberitaan berikutnya adalah berkaitan dengan kecenderungan atau penonjolan isu surat kabar dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Sebagaimana yang tercantum pada tabel 3.5, secara keseluruhan isu yang paling menonjol dalam pemberitaan surat kabar mengenai Muhammadiyah adalah mengenai peran Muhammadiyah secara luas, terutama peran sosial kemasyarakatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Isu mengenai peran Muhammadiyah ini ditampilkan surat kabar sebanyak 13 kali (13%). Isu-isu lain yang juga menonjol di surat kabar mengenai Muhammadiyah adalah isu mengenai hubungan antara

Muhammadiyah dan negara atau pemerintah, yakni sebanyak 12 (12%). Kemudian isu mengenai keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah sebanyak 11 (11%), isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik praktis atau partai politik, sebanyak 10 (10%). Berikutnya isu mengenai bursa calon ketua umum PP Muhammadiyah sebanyak 7 (7%), isu mengenai gagalnya regenerasi di Muhammadiyah, 6 (6%), dan isu mengenai kontroversi pencalonan Muchdi PR sebagai salah satu calon ketua PP Muhammadiyah juga ditonjolkan oleh surat kabar sebanyak 5 (5%).

Sedangkan bila dilihat dari kecenderungan masing-masing surat kabar, terlihat setiap surat kabar cenderung menonjolkan isu yang berbeda-beda. Seperti yang terlihat pada tabel 3.5, Kompas dalam pemberitaannya mengenai Muhammadiyah lebih menonjolkan mengenai isu keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah, dan isu mengenai gagalnya regenerasi di tubuh Muhammadiyah. Seperti yang dimuat Kompas dalam judul *“Din Syamsuddin Ketua Umum Lagi Ketua Umum Aisyiyah Siti Noordjanah Djohantini: Aisyiyah Akan Lebih Bersuara ke Depan”* (8/7/10). Dalam berita tersebut ditulis, *“Selama ini ada kesan perempuan lebih banyak diam untuk menjaga suasana tetap harmonis. Ke depan, Aisyiyah memilih bersuara sehingga pendapat mereka didengar”*, (Siti Noordjanah Djohantini). Mengenai gagalnya regenerasi Muhammadiyah ditulis Kompas pada berita berjudul, *“Wajib Lama Kuasai Muhammadiyah”* (7/7/10), yang berisi kutipan berikut: *“kurangnya kader muda yang terlibat dalam kepemimpinan PP Muhammadiyah dikhawatirkan akan membuat kaderisasi dan regenerasi di persyarikatan mandek”*, (Asep Purnama Bachtiar).

Adapun Koran Tempo lebih menonjolkan isu mengenai kontroversi pencalonan Muchdi PR sebagai salah satu calon ketua PP Muhammadiyah, dan isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan partai politik. Isu mengenai kontroversi pencalonan Muchdi PR ditulis Koran Tempo pada berita berjudul, *“Bursa Ketua Umum PP Muhammadiyah: Muchdi Pr Calonkan Diri”* (2/7/10), yang berisi, *“bila akhirnya Muchdi terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, itu akan menjadi aib bagi organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Achmad Dahlan tersebut”*, (Suciwati). Sedangkan pada isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan partai politik, Koran Tempo menulisnya pada berita berjudul, *“Muhammadiyah Diminta Tetap Netral”* (5/7/10), isi beritanya di antaranya, *“Muhammadiyah dan PAN tidak akan saling meninggalkan. Ini dilandasi hubungan sejarah dan aspirasi Muhammadiyah yang tersalurkan melalui PAN”*, (Amien Rais).

Sedangkan Media Indonesia selain menonjolkan mengenai peran Muhammadiyah, juga menonjolkan isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan negara, dan isu mengenai keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah. Seperti yang diberitakan Media Indonesia dalam berita, *“Muhammadiyah Harus Harmonis dengan Pemerintah”* (1/7/10). Dalam berita tersebut Media

Indonesia mengutip pernyataan Amien Rais, *“hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah saat ini terlibat tidak harmonis. Salah satu indikatornya adalah ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka muktamar Muhammadiyah”*, (Amien Rais). Sedangkan mengenai isu keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah ditonjolkan oleh Media Indonesia dalam berita berjudul, *“Aisyiyah Protes ke Muhammadiyah”* (5/7/10), yang isinya di antaranya, *“Pimpinan Pusat Aisyiyah yang didukung seluruh Pimpinan Wilayah Aisyiyah di 33 provinsi melayangkan nota keberatan atas hasil pemilihan 39 calon anggota PP Muhammadiyah periode 2010-2015 karena dinilai tidak mencerminkan keterwakilan kaum perempuan”*.

Sementara Republika menonjolkan isu mengenai hubungan antara Muhammadiyah dan negara atau pemerintah, dan isu mengenai sistem pemilihan ketua PP Muhammadiyah, selain juga isu mengenai peran Muhammadiyah itu sendiri. Mengenai hubungan antara Muhammadiyah dan negara (pemerintah), Republika memuatnya dalam berita *“Hubungan dengan Pemerintah Baik”* (2/7/10), yang mengutip pernyataan Din Syamsuddin, *“hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah tak mungkin tak baik karena keduanya membutuhkan satu sama lain”*. Mengenai isu sistem pemilihan ketua PP Muhammadiyah, Republika menulisnya dalam berita, *“Perlu Pembatasan Periode”* (6/7/10), isi berita tersebut di antaranya, *“pembatasan periode kerja tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses regenerasi dan kaderisasi di jajaran kepemimpinan”*, (Hajriyanto Thohari). Adapun mengenai peran Muhammadiyah, Republika di antaranya menulis pada berita *“Tradisi Sosial Kiai Dablan Masih Relevan”* (6/7/10). Dalam berita itu Republika menulis, *“keterikatan Muhammadiyah dengan kerja-kerja sosial adalah inti dari gerakan pembaruan seperti yang dicetuskan oleh Kiai Ahmad Dablan. Dalam perspektif sejarah kelahirannya, persyarikatan Muhammadiyah sudah pro kaum dhuafa”*, (A. Munir Mul Khan).

Suara Pembaruan lebih banyak menonjolkan mengenai isu hubungan Muhammadiyah dengan partai politik terutama Partai Amanat Nasional (PAN), dan juga isu mengenai bursa calon ketua PP Muhammadiyah. Mengenai isu hubungan Muhammadiyah dengan partai politisi Suara Pembaruan menulisnya dalam berita, *“Muhammadiyah Nonpartisan”* (6/7/10). Dalam berita tersebut ditulis, *“posisi politik Muhammadiyah adalah netral kepada semua parpol, termasuk PAN, bahkan dengan pemerintah”*, (Din Syamsuddin). *“Muhammadiyah harus menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Tidak ada yang diistimewakan”*, (Syafii Maarif). *“Banyak tokoh Muhammadiyah yang menjadi pilar di parpol, namun bukan berarti Muhammadiyah berpolitik”*, (Abdul Mu’ti). Sedangkan mengenai isu bursa calon ketua PP Muhammadiyah, Suara Pembaruan menulis dalam berita, *“Muhammadiyah dan PAN Tak Terpisahkan, Haedar dan Yunahar Pesaing Berat Din”* (5/7/10), isinya adalah pernyataan berikut: *“meski di atas kertas Din Syamsuddin adalah kandidat terkuat, namun masih*

*sulit diprediksi siapa yang bakal dipilih sebagai ketua umum PP Muhammadiyah”, (Andar Nubowo).
“Nanti saja lihat hasil pemilihan 13 nama itu. Biar fair saja. Sya tidak akan komentar”, (Amien Rais).*

Tabel 2.5. Kecenderungan (Penonjolan) Isu Surat Kabar dalam Pemberitaan mengenai Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam selama Muktamar ke-46

Kategori Penonjolan Isu	Nama Surat Kabar					Jumlah
	Kompas	Koran Tempo	MI	Republika	Suara Pembaruan	
Peran Muhammadiyah	2 (11%)	1 (8%)	4 (22%)	6 (17%)	0	13 (13%)
Muhammadiyah dengan Negara	2 (11%)	1 (8%)	3 (17%)	5 (14%)	1 (8%)	12 (12%)
Keterwakilan Perempuan	4 (21%)	1 (8%)	3 (17%)	2 (6%)	1 (8%)	11(11%)
Muhammadiyah dengan Politik	2 (11%)	2 (15%)	0	2 (6%)	4 (33%)	10 (10%)
Bursa Calon PP Muhammadiyah	0	2 (15%)	1 (6%)	2 (6%)	2 (17%)	7 (7%)
Regenerasi Muhammadiyah	3 (16%)	0	1 (6%)	2 (6%)	0	6 (6%)
Kontroversi Pencalonan Muchdi	0	3 (23%)	2 (11%)	0	0	5 (5%)
Kepemimpinan Muhammadiyah	2 (11%)	0	0	2 (6%)	0	4 (4%)
Calon PP dari Politisi	1 (5%)	1 (8%)	0	1 (3%)	0	3 (3%)
Intervensi terhadap Muhammadiyah	1 (5%)	0	0	1 (3%)	1 (8%)	3 (3%)
Sistem Pemilihan Ketua PP	0	0	0	3 (8%)	0	3 (3%)
Din Calon Kuat Ketua PP	0	1 (8%)	1 (6%)	1 (3%)	0	3 (3%)
Terpilihnya Din sebagai Ketua PP	0	1 (8%)	1 (6%)	1 (3%)	0	3 (3%)
Keterbukaan Muhammadiyah	1 (5%)	0	0	1 (3%)	0	2 (2%)
Keberpihakan Muhammadiyah	0	0	1 (6%)	1 (3%)	0	2 (2%)
Pemberantasan Korupsi	0	0	0	1 (3%)	1 (8%)	2 (2%)
Evaluasi terhadap Muhammadiyah	0	0	0	1 (3%)	1 (8%)	2 (2%)
Isu-isu Lain (@1)	1 (5%)	0	1 (6%)	4 (11%)	1 (8%)	7 (7%)
Jumlah	19(19%)	13 (13%)	18 (18%)	36 (36%)	12 (12%)	98

Pola pemberitaan mengenai Muhammadiyah yang lain berkaitan dengan kecenderungan isi surat kabar dalam memberitakan Muhammadiyah. Ada tiga kategori kecenderungan isi yang ditentukan, yaitu positif, negatif, dan netral. Disebut kecenderungan positif bila isi berita surat kabar menunjukkan keberhasilan/kelebihan Muhammadiyah. Sedangkan kecenderungan negatif bila isi berita surat kabar menunjukkan kegagalan/kelemahan Muhammadiyah. Adapun kecenderungan isi netral bila isi berita surat kabar tidak menunjukkan keberhasilan/kelebihan ataupun kegagalan/kelemahan Muhammadiyah.

Sebagaimana terlihat pada tabel 3.6, ada 62 berita mengenai Muhammadiyah, secara keseluruhan pemberitaan surat kabar mengenai Muhammadiyah cenderung netral, yakni sebanyak 38 berita (61%). Namun bila dibandingkan antara kecenderungan isi positif dengan kecenderungan isi negatif, maka pemberitaan surat kabar mengenai Muhammadiyah cenderung negatif. Dari 62 berita tercatat 9 berita (15%) yang cenderung positif dan terdapat 15 berita (24%) yang cenderung negatif. Seperti yang dijelaskan di atas, kecenderungan pemberitaan surat kabar yang negatif ini berkaitan dengan kritik atau pernyataan-pernyataan mengenai kegagalan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam.

Sedangkan bila dilihat per surat kabar terlihat masing-masing surat kabar mempunyai kecenderungan yang berbeda. Kompas misalnya dari 13 beritanya mengenai Muhammadiyah kecenderungan isinya relatif seimbang, 4 berita (31%) positif, 5 berita (38%) negatif, dan 4 berita (31%) netral. Kecenderungan isi Kompas yang positif mengenai Muhammadiyah dapat dilihat pada berita berjudul *"Negara-Muhammadiyah Saling Membutuhkan"* (4/7/10). Isi berita tersebut di antaranya, *"kurun waktu satu abad, Muhammadiyah tumbuh menjadi organisasi kemasyarakatan besar yang terus bergerak ke depan membangun pendidikan, kesehatan, dan sosial. Muhammadiyah juga berperan aktif dalam pergaulan global, membangun dialog antarperadaban"*, (SBY). Sedangkan kecenderungan isi yang negatif dari Kompas mengenai Muhammadiyah dapat dibaca pada berita, *"Muhammadiyah Terbuka Sejak Lahir"* (6/7/10), yang isinya, *"tidak terkelolanya pembaruan pemikiran yang terus menerus itu membuat Muhammadiyah saat ini cenderung tertutup atau eksklusif. Pluralisme yang menjadi dasar pendirian Muhammadiyah justru ditentang oleh sebagian kader dan aktivis Muhammadiyah saat ini"*, (A Syafii Maarif).

Sedangkan Koran Tempo dari 9 beritanya mengenai Muhammadiyah, kecenderungan isi semua beritanya bersifat netral. Beberapa berita Koran Tempo yang bersifat netral misalnya pada berita berjudul, *"Din Syamsuddin dan Haedar Nasir Calon Kuat"* (1/7/10). Isi berita tersebut di antaranya, *"Pak Din mungkin bisa lolos karena beliau incumbent, sedangkan Pak Haedar adalah senior dan banyak pengalaman organisasi"*, (Asep Purnama Bachtiar). Atau pada berita lain yang berjudul, *"Din*

Syamsuddin Kembali Pimpin Muhammadiyah” (8/7/10), di dalamnya Koran Tempo menulis, “*Din terpilih melalui musyawarah 13 anggota pengurus pusat Muhammadiyah*”. Kutipan lainnya, “*Harus berani dan galak jika kebijakan dan tindakan Din merugikan Muhammadiyah*”, (Syafii Maarif). “*Kami akan mengingatkan ketua umum,*” (Goodwil Zubir).

Media Indonesia memunyai kecenderungan yang berbeda dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah. Dari 11 beritanya tentang Muhammadiyah, tidak satupun yang cenderung positif. Kecenderungan isi Media Indonesia adalah negatif, yakni 5 berita (45%), dan netral 6 berita (55%). Pemberitaan Media Indonesia yang negatif mengenai Muhammadiyah misalnya dapat dilihat pada berita berjudul, “*Haedar Nashir Teratas*” (3/7/10). Dalam berita tersebut Media Indonesia menulis, “*Muhammadiyah yang kini berusia satu abad masih fokus pada kegiatan ritual belaka, padahal cita-cita pendirinya, KH Ahmad Dahlan, adalah menjadikan organisasi ini sebagai gerakan sosial*”, (Imam Suprayogo). Atau pada berita lain, “*Muhammadiyah dikuasai Laki-laki*” (6/7/10), Media Indonesia mengutip pernyataan Syafii Maarif, “*selama ini Muhammadiyah dikuasai kader laki-laki*”.

Adapun Republika secara keseluruhan kecenderungan isinya adalah bersifat netral. Dari 22 beritanya mengenai Muhammadiyah, 17 berita (77%) adalah cenderung netral. 3 berita (14%) cenderung positif, dan hanya 2 berita (9%) yang bersifat negatif. Salah satu berita yang kecenderungan isinya positif berjudul, “*Pembawa Misi Islam*” (4/7/10), yang berisi pernyataan berikut, “*gerakan Muhammadiyah telah membawa pencerahan dan pembaruan pemikiran umat Islam sehingga tak berlebihan apabila Muhammadiyah berhasil memperbarui suasana intelektual kaum Muslimin di tanah air*”, (SBY). Sedangkan berita Republika yang mempunyai kecenderungan negatif terdapat pada berita, “*Muhammadiyah Diminta Meningkatkan Keberpibakan*” (11/07/10). Dalam berita tersebut ditulis, “*Selama tiga tahun terakhir, Muhammadiyah masih terbatas gejala pragmatisme ekonomi dan politik yang tidak jelas. Pendidikan yang dikelola Muhammadiyah masih terlalu mahal dan kurang memiliki karakteristik yang jelas dengan pendidikan lainnya*”, (Zuly Qodir).

Untuk Suara Pembaruan, kecenderungan isinya mirip dengan Kompas, yakni cenderung negatif dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah. Dari 7 beritanya mengenai Muhammadiyah, 3 berita (43%) cenderung negatif, 2 berita (29%) bersifat positif, dan 2 berita (29%) bersifat netral. Kecenderungan isi yang negatif Suara Pembaruan misalnya terlihat pada berita, “*Muhammadiyah Egosentrik dan Narsis*” (7/7/10). Dalam berita tersebut dinyatakan, “*Muhammadiyah selama ini lebih bersifat egosentrik, subyektif, dan terlalu memuji diri sendiri atau narsis. Pencapaian yang diklaim sebagai keberhasilan Muhammadiyah susah diukur*”, (Mitsuo Nakamura). Atau dalam berita, “*Muhammadiyah Pastikan Tak Berpolitik*” (8/7/10), yang isinya, “*tanpa disadari kegiatan Amien dalam berkunjung ke daerah-daerah yang selalu membagi-bagikan uang merupakan hal yang*

destruktif”, (Mohammad Sayuti). Sedangkan kecenderungan isi Suara Pembaruan yang positif mengenai Muhammadiyah dapat dilihat pada berita, *“Parpol Incar Muhammadiyah”* (3/7/10). Isi berita tersebut adalah, *“Sebagai ormas yang berusia satu abad dan telah melabirakan banyak tokoh politik, Muhammadiyah memang memiliki pengaruh yang cukup penting”*, (Mahfudz Siddiq).

Kecenderungan surat kabar yang cenderung negatif, yakni menonjolkan kelemahan dan ketidakberhasilan dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah menunjukkan dalam beberapa aspek Muhammadiyah memerlukan pembenahan. Apa yang ditampilkan surat kabar merupakan satu persepektif dalam melihat Muhammadiyah. Meskipun dengan catatan bahwa tidak semua yang ditampilkan surat kabar merupakan sesuatu yang negatif, ada juga yang bersifat positif.

Tabel 3.6. Kecenderungan Isi Surat Kabar dalam Pemberitaan mengenai Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam selama Muktamar ke-46

Kategori Kecenderungan Isi	Nama Surat Kabar					Jumlah
	Kompas	Koran Tempo	MI	Repub lika	Suara Pembaruan	
Positif	4 (31%)	0	0	3 (14%)	2 (29%)	9 (15%)
Negatif	5 (38%)	0	5 (45%)	2 (9%)	3 (43%)	15 (24%)
Netral	4 (31%)	9 (100%)	6 (55%)	17 (77%)	2 (29%)	38 (61%)
Jumlah	13 (21%)	9 (15%)	11 (18%)	22 (35%)	7 (11%)	62

3.2. Framing mengenai Muhammadiyah

Pada dasarnya framing merupakan pengembangan dari analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Banyak konsep yang dikemukakan untuk mendefinisikan framing. Menurut Gamson dan Modigliani, frame adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek suatu wacana (Sobur, 2001: 162). Sedangkan menurut Entman framing merupakan proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibanding dari aspek-aspek lainnya (Eriyanto, 2002: 67)

Ada dua aspek penting dari framing, yaitu pertama, memilih fakta atau realitas. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan, yakni apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Kedua adalah menuliskan fakta, yaitu bagaimana menulis fakta yang telah dipilih secara sedemikian rupa untuk disajikan kepada khalayak (Eriyanto, 2002: 69-70).

Dalam praktiknya framing membantu kita untuk mengetahui bagaimana realitas peristiwa yang sama tapi dikemas secara berbeda sehingga menghasilkan berita yang berbeda juga.

Sehingga framing mempunyai beberapa efek yang dipraktikkan oleh media massa, pertama dengan menonjolkan aspek tertentu dan mengaburkan aspek lain yang ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Berita, secara sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu, akibatnya ada aspek lainnya yang tidak mendapat perhatian atau sengaja diabaikan. Kedua, menampilkan sisi tertentu dan melupakan sisi lainnya. Ketiga, menampilkan aktor tertentu dan menyembunyikan aktor lainnya. Di sini media sering memfokuskan pemberitaannya pada aktor (pelaku berita) tertentu, akibatnya aktor lain yang semestinya juga relevan dan penting menjadi terlupakan (Eriyanto, 2002: 141).

Berdasarkan penonjolan isu surat kabar mengenai Muhammadiyah selama muktamar ke-46, maka ditentukan beberapa isu yang dibingkai (framing) oleh masing-masing surat kabar mengenai Muhammadiyah. Kompas membingkai isu mengenai regenerasi di tubuh Muhammadiyah dan keterwakilan perempuan (Aisyiyah) di PP Muhammadiyah sebagai isu yang paling menonjol selama muktamar. Sedangkan Koran Tempo membingkai isu mengenai kontroversi pencalonan Muchdi Pr sebagai ketua PP Muhammadiyah dan mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik praktis. Adapun Media Indonesia membingkai isu mengenai keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah dan mengenai hubungan antara Muhammadiyah dan pemerintah. Republika membingkai isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah dan isu mengenai peran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan. Sedangkan Suara Pembaruan membingkai khusus mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik praktis.

Sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.1 tentang framing Kompas mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam selama muktamar ke-46, untuk isu mengenai regenerasi di tubuh Muhammadiyah Kompas membingkai bahwa regenerasi di Muhammadiyah telah gagal. Secara lebih detil framing Kompas tersebut dapat diamati dari kedua elemen framingnya, yakni *framing devices* (perangkat framing) dan *reasoning devices* (perangkat penalaran). Pada perangkat framing, yakni elemen *metaphor* Kompas melihat Muhammadiyah terjebak pada nama-nama besar anggota-anggotanya yang selama ini muncul, meskipun mereka belum tentu mampu membawa Muhammadiyah menjadi gerakan pembaruan. Selain itu, gagalnya regenerasi Muhammadiyah tersebut dapat dilihat dari elemen *catchphrases* yang menggambarkan munculnya tokoh-tokoh Muhammadiyah yang itu-itu lagi sehingga terkesan Muhammadiyah tidak mempunyai tokoh lain yang pantas menjadi calon ketua PP Muhammadiyah. Meskipun secara institusional gagalnya regenerasi ini mendapat pembenaran, karena bukan hanya Muhammadiyah yang gagal dalam regenerasi (*exemplars*). Tapi menurut framing Kompas, gagalnya regenerasi di tubuh

Muhammadiyah adalah karena saat ini Muhammadiyah terjebak dalam pelembagaan birokratisasi dan semakin pragmatis (*depiction*). Sehingga melupakan pentingnya proses regenerasi di organisasi.

Beberapa alasan yang mendukung framing Kompas mengenai gagalnya regenerasi Muhammadiyah dapat diamati juga pada perangkat penalaran. Pada elemen *roots* menunjukkan bahwa Muhammadiyah akan mengalami krisis institusional bila kepentingan kaderisasi dan regenerasi ini diabaikan. Secara lebih prinsip kurangnya kader muda yang terlibat dalam kepemimpinan PP Muhammadiyah akan membuat kaderisasi dan regenerasi di tubuh Muhammadiyah menjadi mandek (*appeal to principles*). Untuk itu menurut Kompas, konsekuensinya adalah Muhammadiyah saat ini memang membutuhkan regenerasi kepemimpinan agar tidak menimbulkan krisis kepemimpinan institusional.

Gambar 2.1. Analisis Framing Pemberitaan Surat Kabar Kompas mengenai Isu Regenerasi Muhammadiyah selama Muktamar ke-46

<i>Frame:</i> Gagalnya Regenerasi Muhammadiyah	
<i>Framing Devices</i> (perangkat framing)	<i>Reasoning Devices</i> (perangkat penalaran)
<i>Metaphors:</i> Nama besar bukan jaminan untuk mampu membawa Muhammadiyah menuju pembaruan (<i>tajdid</i>) memasuki abad ke-2 berdirinya Muhammadiyah.	<i>Roots:</i> Muhammadiyah akan sulit terhindar dari krisis institusional jika kepentingan kaderisasi dan regenerasi diabaikan.
<i>Catchphrases:</i> Banyaknya anggota PP Muhammadiyah yang dicalonkan lagi itu mencerminkan ada masalah dalam pembinaan organisasi.	<i>Appeal to Principles:</i> Kurangnya kader muda yang terlibat dalam kepemimpinan PP Muhammadiyah dikhawatirkan akan membuat kaderisasi dan regenerasi di persyarikatan mandek.
<i>Exemplar:</i> Stagnasi regenerasi Muhammadiyah sebenarnya juga terjadi di organisasi kemasyarakatan Islam lain atau partai politik. Bahkan, di sejumlah partai, menguatnya dominasi tokoh lama jauh lebih terasa.	<i>Consequences:</i> Muhammadiyah membutuhkan regenerasi kepemimpinan agar tidak menimbulkan krisis kepemimpinan institusional.
<i>Depiction:</i> Saat ini Muhammadiyah terjebak dalam pelembagaan birokratisasi dan semakin pragmatis.	
<i>Visual Image:</i> -	

Pada isu lain yang juga menonjol diberitakan oleh Kompas adalah mengenai keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah. Kompas membingkai isu dengan bingkai bahwa PP Muhammadiyah tertutup bagi perempuan (*Aisyiyah*). Seperti yang terlihat pada gambar 3.2, pembedaan Kompas ini diperkuat dengan elemen-elemen framingnya, misalnya pada elemen *metaphor* yang menganggap selama ini perempuan di Muhammadiyah lebih banyak diam untuk

menjaga hubungan harmonis, meskipun tidak ada keterwakilan mereka di PP Muhammadiyah. Pada elemen *catchphrases* Kompas menegaskan bahwa tidak ada perempuan yang masuk dalam 39 calon tetap ketua PP Muhammadiyah. Pembingkai Kompas bahwa Muhammadiyah tertutup bagi perempuan diperkuat dengan elemen *exemplar* yang menyebutkan bahwa tidak ada satu pun nama perempuan yang masuk daftar calon anggota PP Muhammadiyah. Padahal, sejumlah kalangan menilai, para perempuan yang selama ini menjadi anggota Aisyiyah punya kapasitas menjadi anggota PP Muhammadiyah. Kondisi tersebut membuat seakan kontribusi perempuan atau Aisyiyah selama ini tidak dihargai (*depiction*).

Secara nalar apa yang dibingkai oleh Kompas diperkuat dengan alasan-alasan yang membenarkan dan dianggap sebagai rasionalisasi mengapa Muhammadiyah tidak memerlukan perempuan dalam pengurus pusatnya. Pada elemen *roots* jelas sekali terlihat bahwa selama ini perempuan Muhammadiyah sudah memunyai Aisyiyah sehingga perempuan-perempuan dapat lebih fokus di sana. Pada elemen *appeal to principles* juga demikian, bukan berarti Muhammadiyah tertutup bagi perempuan tapi perempuan Muhammadiyah sudah mengelola Aisyiyah sehingga tidak perlu lagi terlibat di kepengurusan Muhammadiyah. Untuk itu, sebagai konsekuensinya diharapkan di masa-masa mendatang Aisyiyah tidak berdiam diri dan berani lebih bersuara untuk mengemukakan pendapat dan memperkuat perannya di Muhammadiyah.

Gambar 2.2. Analisis Framing Pemberitaan Surat Kabar Kompas mengenai Isu Keterwakilan Perempuan selama Muktamar ke-46

<i>Frame:</i> PP Muhammadiyah Tertutup bagi Perempuan	
<i>Framing Devices</i> (perangkat framing)	<i>Reasoning Devices</i> (perangkat penalaran)
<i>Metaphors:</i> Selama ini ada kesan perempuan lebih banyak diam untuk menjaga suasana tetap harmonis.	<i>Roots:</i> Perempuan Muhammadiyah sudah punya Aisyiyah sehingga mereka lebih berkonsentrasi di sana.
<i>Catchphrases:</i> Tak ada perempuan yang masuk dalam 39 calon tetap itu.	<i>Appeal to Principles:</i> Bukan berarti Muhammadiyah tertutup untuk perempuan. Selain mengurus sejumlah majelis dalam struktur PP Muhammadiyah, perempuan Muhammadiyah juga mengelola Aisyiyah, lembaga otonom yang bergiat di berbagai bidang.
<i>Exemplar:</i> Tidak ada satu pun nama perempuan yang masuk daftar calon anggota PP Muhammadiyah. Padahal, sejumlah kalangan menilai, para perempuan yang selama ini menjadi anggota Aisyiyah punya kapasitas menjadi anggota PP Muhammadiyah.	<i>Consequences:</i> Ke depan, Aisyiyah memilih bersuara sehingga pendapat mereka didengar.

<i>Depiction:</i> Kontribusi Aisyiyah tidak dihargai dalam kepemimpinan kolektif Persyarikatan Muhammadiyah.	
<i>Visual Image:</i> -	

Untuk Koran Tempo isu yang ditonjolkan berkaitan dengan pemberitaan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam selama muktamarnya yang ke-46 adalah mengenai kontroversi pencalonan Muchdi Pr sebagai ketua PP Muhammadiyah dan mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik.

Seperti yang dapat diamati pada gambar 2.3, pada isu mengenai kontroversi pencalonan Muchdi Pr Koran Tempo membingkai bahwa Muchdi Pr tidak layak menjadi ketua PP Muhammadiyah. Menurut Koran Tempo sosok Muchdi dianggap tidak bersih dari pelanggaran hak asasi manusia (*metaphors*). Dalam elemen *catchphrases* Koran Tempo mempertegas framenya bahwa Muchdi tidak pantas menjadi Ketua Umum Muhammadiyah. Sosok seperti dia sama sekali tidak layak. Koran Tempo pada elemen *exemplarsnya* mengaitkan Muchdi dengan kasus kematian aktivis hak asasi manusia, Munir. Bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini sempat menjadi terdakwa, namun putusan kasasi membebaskannya dari hukuman. Menurut Koran Tempo bila akhirnya Muchdi terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah itu akan menjadi aib bagi organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Achmad Dahlan tersebut.

Dalam membingkai isu Muchdi ini Koran Tempo mengemukakan beberapa penalaran yang memperkuat bahwa Muchdi tidak layak duduk di PP Muhammadiyah. Pada elemen *roots* Koran Tempo menegaskan akibat bila Muhammadiyah tetap memilih Muchdi, dan menganggap pencalonan bekas Komandan Jenderal Kopassus ini akan membahayakan posisi Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam. Hal tersebut disebabkan keterlibatan Muchdi yang ditulis Koran Tempo dalam elemen *appeal to principles*, setidaknya ada dua kasus besar yang sempat menyeret nama Muchdi dalam puserannya, yakni penculikan aktivis 1998 dan pembunuhan Munir. Untuk itu Koran Tempo menyarankan agar mempertimbangkan pencalonan Muchdi karena Muhammadiyah akan menanggung beban etika dan politik yang tidak ringan (*consequenses*).

Gambar 2.3. Analisis Framing Pemberitaan Surat Kabar Koran Tempo mengenai Isu Pencalonan Muchdi Pr selama Muktamar ke-46

<i>Frame:</i> Muchdi Pr Tidak Layak di PP Muhammadiyah	
<i>Framing Devices</i> (perangkat framing)	<i>Reasoning Devices</i> (perangkat penalaran)

<i>Metaphors:</i> Sosoknya dianggap tak bersih dari catatan pelanggaran hak asasi manusia.	<i>Roots:</i> Pencalonan bekas Komandan Jenderal Kopassus ini akan membahayakan posisi Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam.
<i>Catchphrases:</i> Muchdi tidak pantas menjadi Ketua Umum Muhammadiyah. Sosok seperti dia sama sekali tidak layak.	<i>Appeal to Principles:</i> Setidaknya ada dua kasus besar yang sempat menyeret nama Muchdi dalam pusarannya, yakni penculikan aktivis 1998 dan pembunuhan Munir.
<i>Exemplar:</i> Nama Muchdi mencuat saat dikaitkan dengan kasus kematian aktivis hak asasi manusia, Munir. Bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini sempat menjadi terdakwa, namun putusan kasasi membebaskannya dari hukuman.	<i>Consequences:</i> Harus dipertimbangkan karena Muhammadiyah akan menanggung beban etika dan politik yang tidak ringan.
<i>Depiction:</i> Bila akhirnya Muchdi terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah itu akan menjadi aib bagi organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Achmad Dahlan tersebut.	
<i>Visual Image:</i> -	

Sedangkan dalam isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik Koran Tempo membingkai bahwa Muhammadiyah tidak akan berpolitik atau netral. Seperti yang terlihat pada gambar 2.4, netralitas politik Muhammadiyah ini dapat dilihat dari elemen-elemen framing Koran Tempo. Pada elemen *metaphors* Koran Tempo menyebutkan bahwa Muhammadiyah seharusnya tetap dalam posisi netral, tidak terjebak dalam warna politik apapun. Hal tersebut juga diperkuat dalam elemen *catchphrases* yang menegaskan Muhammadiyah tidak terlibat politik praktis, tidak mengusung calon tertentu, tapi politik kebangsaan Khittah Tanwir Denpasar, *amar ma'ruf nabi munkar*. Netralitas politik Muhammadiyah yang dibingkai oleh Koran Tempo juga terlihat pada elemen *exemplars*, yang menyatakan sebagai salah satu organisasi masyarakat besar di Indonesia, Muhammadiyah harus tetap melindungi dan menjadi sumber kader di semua lapisan masyarakat. Selain itu, agar Muhammadiyah tidak dimonopoli oleh suatu pihak tertentu yang ingin memanfaatkan organisasi ini (*depiction*).

Koran Tempo memperkuat posisi Muhammadiyah yang netral dalam politik dengan pembenaran bahwa netralitas politik Muhammadiyah merupakan pilihan yang tepat, karena bila Muhammadiyah masuk arus politik maka sangat berpotensi menimbulkan masalah (*roots*). Sikap Muhammadiyah yang tidak berpolitik ini juga diperkuat dalam elemen *appeal to principles* yang menandakan bahwa hasil amanat muktamar antara lain menyebutkan bahwa Muhammadiyah, yang kini berusia satu abad, tetap menjaga jarak dengan partai politik. Sebagai konsekuensinya untuk menjaga netralitas politik Muhammadiyah ini semua anggota Pimpinan Pusat

Muhammadiyah berani bersikap kritis atas kepemimpinan Din, termasuk tindakan yang merugikan, seperti menyeret Muhammadiyah ke ranah politik praktis.

Gambar 2.4. Analisis Framing Pemberitaan Surat Kabar Koran Tempo mengenai Isu Hubungan Muhammadiyah dengan Politik selama Muktamar ke-46

<i>Frame:</i> Netralitas Politik Muhammadiyah	
<i>Framing Devices</i> (perangkat framing)	<i>Reasoning Devices</i> (perangkat penalaran)
<i>Metaphors:</i> Muhammadiyah seharusnya tetap dalam posisi netral, tidak terjebak dalam warna politik apapun.	<i>Roots:</i> Jika masuk arus politik, maka sangat berpotensi menimbulkan masalah.
<i>Catchphrases:</i> Kami tidak terlibat politik praktis, tidak mengukung calon tertentu, tapi politik kebangsaan Khittah Tanwir Denpasar, amar ma'ruf nahi munkar.	<i>Appeal to Principles:</i> Hasil amanat muktamar antara lain menyebutkan bahwa Muhammadiyah, yang kini berusia satu abad, tetap menjaga jarak dengan partai politik.
<i>Exemplar:</i> Sebagai salah satu organisasi masyarakat besar di Indonesia, Muhammadiyah harus tetap melindungi dan menjadi sumber kader di semua lapisan masyarakat.	<i>Consequences:</i> Semua anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah berani bersikap kritis ata kepemimpinan Din, termasuk tindakan yang merugikan, seperti menyeret Muhammadiyah ke ranah politik praktis.
<i>Depiction:</i> Agar Muhammadiyah tidak dimonopoli oleh suatu pihak tertentu yang ingin memanfaatkan organisasi ini.	
<i>Visual Image:</i> -	

Adapun Media Indonesia dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah sebagai organisasi Islam selama muktamar menonjolkan dua isu, yakni isu mengenai keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah (sama dengan Kompas) dan isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah.

Pada isu mengenai keterwakilan perempuan (Aisyiyah) di PP Muhammadiyah, Media Indonesia mempunyai frame yang berbeda dengan Kompas. Dalam isu ini frame Media Indonesia adalah perempuan diakomodasi di PP Muhammadiyah. Sebagaimana dapat diamati pada gambar 2.5, dalam *metaphor* Media Indonesia menyatakan bahwa perempuan akan menempati posisi-posisi strategis sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada elemen *catchphrases* pun demikian, sudah saatnya Muhammadiyah mengakomodasi kader perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan. Meskipun dalam kenyataannya selama ini Muhammadiyah dikuasai laki-laki (*depiction*) dan tidak ada perempuan yang masuk dalam PP Muhammadiyah terpilih, namun Media Indonesia tetap menekankan bahwa perempuan diakomodasi di PP Muhammadiyah. Seperti yang dinyatakan pada elemen *exemplar:* meskipun tidak ada perempuan dalam 13 anggota

PP Muhammadiyah mendatang, masih ada peluang untuk memodifikasi anggota pimpinan tersebut, misalnya dengan menambah anggota perempuan atau melalui majelis-majelis yang dimiliki.

Menurut Media Indonesia, akomodasi terhadap perempuan di PP Muhammadiyah memang tidak lepas dari nota keberatan yang disampaikan oleh PP Aisyiyah berkaitan dengan anggota PP Muhammadiyah terpilih yang tidak ada perempuannya (*roots*). Selain itu, dalam elemen *appeal to principles* dinyatakan bahwa PP Aisyiyah yang merupakan bagian terintegrasi dari Muhammadiyah. Menanggapi hal tersebut sebagai konsekuensinya, Media Indonesia menegaskan bahwa Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin akan memasukkan unsur perempuan dalam jajarannya.

Gambar 2.5. Analisis Framing Pemberitaan Surat Kabar Media Indonesia mengenai Isu Keterwakilan Perempuan selama Muktamar ke-46

<i>Frame:</i> Perempuan diakomodasi di PP Muhammadiyah	
<i>Framing Devices</i> (perangkat framing)	<i>Reasoning Devices</i> (perangkat penalaran)
<i>Metaphors:</i> Perempuan akan menempati posisi-posisi strategis sesuai dengan kebutuhan organisasi.	<i>Roots:</i> Pimpinan Pusat Aisyiyah yang didukung seluruh Pimpinan Wilayah Aisyiyah di 33 provinsi melayangkan nota keberatan atas hasil pemilihan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 karena dinilai tidak mencerminkan keterwakilan perempuan.
<i>Catchphrases:</i> Sudah saatnya Muhammadiyah mengakomodasi kader perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan.	<i>Appeal to Principles:</i> PP Aisyiyah yang merupakan bagian terintegrasi dari Muhammadiyah.
<i>Exemplar:</i> Meskipun tidak ada perempuan dalam 13 anggota PP Muhammadiyah mendatang, masih ada peluang untuk memodifikasi anggota pimpinan tersebut, misalnya dengan menambah anggota perempuan atau melalui majelis-majelis yang dimiliki.	<i>Consequences:</i> Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin akan memasukkan unsur perempuan dalam jajarannya.
<i>Depiction:</i> Selama ini Muhammadiyah dikuasai kader laki-laki.	
<i>Visual Image:</i> -	

Pada isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah Media Indonesia membingkai isu ini dengan menyatakan bahwa Muhammadiyah bersikap loyal-kritis terhadap pemerintah. Seperti yang digambarkan pada gambar 2.6, sikap loyal-kritis Muhammadiyah

terhadap pemerintah dinyatakan pada elemen *catchphrases*. Sikap tersebut diperjelas dalam elemen *exemplars* yang menyatakan bahwa jika pemerintah benar menjalankan pemerintahan, Muhammadiyah di depan membela. Tapi jika menyimpang, Muhammadiyah mengkritisnya. Hal ini sebenarnya tak lepas dari peran Muhammadiyah itu sendiri yang digambarkan dalam elemen *metaphor* yakni Muhammadiyah harus memainkan fungsi *check and balance*. Peran *civil society*, yakni menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat akar rumput. Meskipun demikian, Muhammadiyah juga tetap harus hati-hati karena seringkali Muhammadiyah terlalu vokal mengkritik pemerintah (*depiction*).

Menurut Media Indonesia, sikap loyal-kritis Muhammadiyah terhadap pemerintah dilandasi pemikiran bahwa tidak ada pihak yang bisa menyelesaikan sendiri sehingga perlu kerjasama antara pemerintah dan Muhammadiyah (*roots*). Selain itu secara prinsip Muhammadiyah menganggap masih banyak masalah yang dihadapi bangsa ini, yaitu buta aksara moral yang lebih berbahaya dari buta aksara latin dan arab (*appeal to principles*). Untuk itu sebagai konsekuensinya Muhammadiyah mengajak pemerintah bersama-sama memberantas penyakit buta aksara moral itu (*consequenses*).

Gambar 2.6. Analisis Framing Pemberitaan Media Indonesia mengenai Isu Hubungan Muhammadiyah dengan Pemerintah selama Muktamar ke-46

<i>Frame:</i> Muhammadiyah Loyal-Kritis terhadap Pemerintah	
<i>Framing Devices</i> (perangkat framing)	<i>Reasoning Devices</i> (perangkat penalaran)
<i>Metaphors:</i> Muhammadiyah harus memainkan fungsi check and balance. Peran civil society, yakni menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat akar rumput.	<i>Roots:</i> Tidak ada pihak yang bisa menyelesaikan sendiri sehingga perlu kerjasama antara pemerintah dan Muhammadiyah.
<i>Catchphrases:</i> Muhammadiyah tetap loyal kritis terhadap pemerintah.	<i>Appeal to Principles:</i> Masih banyak masalah yang dihadapi bangsa ini, yaitu buta aksara moral yang lebih berbahaya dari buta aksara latin dan arab.
<i>Exemplar:</i> Jika pemerintah benar menjalankan pemerintahan, Muhammadiyah di depan membela. Tapi jika menyimpang, Muhammadiyah mengkritisnya.	<i>Consequences:</i> Muhammadiyah mengajak pemerintah bersama-sama memberantas penyakit buta aksara moral itu.
<i>Depiction:</i> Din terlalu vokal mengkritik pemerintah.	
<i>Visual Image:</i> -	

Sedangkan Republika dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam selama muktamar menonjolkan isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan

pemerintah (sama dengan Media Indonesia) dan isu mengenai peran Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan. Pada isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah Republika membingkai dengan menyatakan hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah baik dan proporsional. Framing Republika ini sama dengan Media Indonesia bahwa hubungan antara Muhammadiyah dan pemerintah tidak ada masalah. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.7, elemen-elemen framing Republika menunjukkan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah baik dan proporsional.

Pada elemen *metaphors* Republika menuliskan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah dilandasi dengan politik tingkat tinggi Muhammadiyah yang mendorong terwujudnya politik yang bermoral. Hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah baik dan proporsional sendiri dinyatakan dalam elemen *catchphrases*, yang menyatakan hubungan pemerintah dengan Muhammadiyah akan tetap baik dan proporsional. Hal itu kemudian diperjelas dalam elemen *exemplars* yang menyatakan bahwa siapa pun presidennya dan pemerintahannya, kita tetap loyal. Tapi, Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah *amar makruf nabi munkar* tetap akan mengkritik pemerintah bila melakukan kesalahan. Dalam menjalin hubungan dengan pemerintah Muhammadiyah menghindari sikap pecundang sebagaimana digambarkan dalam elemen *depiction*, kalau mentalitas kita pecundang karena kita takut dan khawatir jadilah kita pecundang, mengutip pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Republika memperjelas framenya mengenai Muhammadiyah dalam hubungannya dengan pemerintah pada perangkat penalarannya. Dalam elemen *roots* Republika menyatakan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah tak mungkin tak baik karena keduanya membutuhkan satu sama lain. Menurut Republika, kritik dilakukan atas dasar rasa cinta Muhammadiyah terhadap pemerintah, jadi tak ada masalah (*appeal to principles*). Untuk itu sebagai konsekuensinya pemerintah yang taat dan berdaulat akan didukung penuh oleh Muhammadiyah. Tetapi, pemerintah yang melanggar aturan akan dikritik sebagai bagian kecintaan terhadap pemerintah.

Gambar 2.7. Analisis Framing Pemberitaan Surat Kabar Republika mengenai Hubungan Muhammadiyah dengan Pemerintah selama Muktamar ke-46

<i>Frame:</i> Hubungan Muhammadiyah dengan Pemerintah Baik dan Proporsional	
<i>Framing Devices</i> (perangkat framing)	<i>Reasoning Devices</i> (perangkat penalaran)
<i>Metaphors</i> : Muhammadiyah selama ini bersuara dalam tataran politik tinggi untuk mendorong terwujudnya politik yang	<i>Roots</i> : Hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah tak mungkin tak baik karena keduanya membutuhkan satu sama lain.

bermoral.	
<i>Catchphrases:</i> Hubungan pemerintah dengan Muhammadiyah akan tetap baik dan proporsional.	<i>Appeal to Principles:</i> Kritik dilakukan atas dasar rasa cinta Muhammadiyah terhadap pemerintah, jadi tak ada masalah.
<i>Exemplar:</i> Siapa pun presidennya dan pemerintahannya, kita tetap loyal. Tapi, Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah amar makruf nahi munkar tetap akan mengkritik pemerintah bila melakukan kesalahan.	<i>Consequences:</i> Pemerintah yang taat dan berdaulat akan didukung penuh oleh Muhammadiyah. Tetapi, pemerintah yang melanggar aturan akan dikritik sebagai bagian kecintaan terhadap pemerintah.
<i>Depiction:</i> Kalau mentalitas kita pecundang karena kita takut dan khawatir jadilah kita pecundang.	
<i>Visual Image:</i> -	

Sedangkan mengenai isu peran Muhammadiyah, Republika membingkai isu ini dengan menyebutkan Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan. Sebagaimana ditunjukkan dalam elemen-elemen framing pada gambar 2.8, yang menunjukkan Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan. Pada elemen *metaphor* Republika menyebutkan Muhammadiyah telah memasuki abad kesinambungan perjuangan dalam melaksanakan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Menurut Republika pencerahan merupakan sebuah proses yang progresif (*catchphrases*). Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan karena gerakan Muhammadiyah telah membawa pencerahan dan pembaruan pemikiran umat Islam sehingga tidak berlebihan apabila Muhammadiyah berhasil memperbaiki suasana intelektual Muslimin di Tanah Air (*exemplars*). Salah satu bentuk pencerahan yang harus dilakukan adalah Muhammadiyah diharapkan mampu mengatasi kejumudan di bidang ekonomi (*depiction*).

Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan selama ini memang telah dibuktikan. Dalam elemen *roots* Republika menuliskan bahwa Muhammadiyah memang harus selalu tampil di barisan terdepan untuk menjadi kekuatan perubahan yang bersifat transformatif mendukung terbangunnya umat Islam yang utama. Selain itu, Muhammadiyah juga telah melakukan revitalisasi terhadap gerakan Muhammadiyah sendiri, yakni lebih fokus sebagai gerakan pencerah (*appeal to principles*). Untuk itu, di masa depan Muhammadiyah harus lebih meningkatkan kemandirian organisasinya dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat (*consequences*).

Gambar 2.8. Analisis Framing Pemberitaan Surat Kabar Republika mengenai Isu Peran Muhammadiyah selama Muktamar ke-46

<i>Frame:</i> Muhammadiyah sebagai Gerakan Pencerahan	
<i>Framing Devices</i>	<i>Reasoning Devices</i>

(perangkat framing)	(perangkat penalaran)
<i>Metaphors</i> : Muhammadiyah telah memasuki abad kesinambungan perjuangan dalam melaksanakan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.	<i>Roots</i> : Muhammadiyah memang harus selalu tampil di barisan terdepan untuk menjadi kekuatan perubahan yang bersifat transformatif mendukung terbangunnya umat Islam yang utama.
<i>Catchphrases</i> : Pencerahan merupakan sebuah proses yang progresif.	<i>Appeal to Principles</i> : Muhammadiyah juga telah melakukan revitalisasi terhadap gerakan Muhammadiyah sendiri, yakni lebih fokus sebagai gerakan pencerah.
<i>Exemplar</i> : Gerakan Muhammadiyah telah membawa pencerahan dan pembaruan pemikiran umat Islam sehingga tidak berlebihan apabila Muhammadiyah berhasil memperbarui suasana intelektual Muslimin di Tanah Air.	<i>Consequences</i> : Ke depan Muhammadiyah harus lebih meningkatkan kemandirian organisasinya dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
<i>Depiction</i> : Muhammadiyah diminta atasi kejumudan ekonomi.	
<i>Visual Image</i> : -	

Suara Pembaruan dalam memberitakan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam selama muktamar hanya menonjolkan satu isu, yakni isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik praktis (sama dengan Media Indonesia). Dalam isu ini framing Suara Pembaruan tidak jauh berbeda dengan Media Indonesia, yakni Muhammadiyah tak berpolitik dan nonpartisan. Sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.9, elemen-elemen framing Suara Pembaruan menunjukkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang tidak berpolitik praktis dan nonpartisan.

Pada elemen *metaphors* Suara Pembaruan menyatakan Muhammadiyah jangan sampai terserempet politik. Sikap Muhammadiyah dipertegas dalam elemen *catchphrases* Suara Pembaruan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan dengan partai politik mana pun. Selanjutnya diperjelas dalam elemen *exemplars* yang menyebutkan bahwa Muhammadiyah memang tidak mempunyai hubungan dengan partai politik termasuk dengan PAN. Muhammadiyah dan PAN memang tidak memiliki hubungan organisatoris dan hubungan struktural, tapi ada hubungan kesejarahan. Dalam hubungannya dengan PAN ini digambarkan pada elemen *depiction* yang menyebutkan jika PAN menghormati Muhammadiyah maka jangan campur tangani Muhammadiyah, biar berkembang. Muhammadiyah juga tidak perlu mengatur PAN.

Sikap Muhammadiyah yang nonpartisan dan tidak berpolitik ini bukannya tanpa alasan. Salah satunya adalah seperti yang dinyatakan dalam elemen *roots*, yakni karena Muhammadiyah harus menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Tidak ada yang diistimewakan.

Meskipun harus diakui juga bahwa banyak tokoh Muhammadiyah yang menjadi pilar di parpol, namun bukan berarti Muhammadiyah berpolitik (*appeal to principles*). Untuk itu sebagai konsekuensinya ke depan, ormas ini akan lebih fokus pada pengembangan program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keagamaan, sesuai cita-cita pendirinya.

Gambar 2.9. Analisis Framing Pemberitaan Surat Kabar Suara Pembaruan mengenai Isu Hubungan Muhammadiyah dengan Politik selama Muktamar ke-46

<i>Frame:</i> Muhammadiyah Tak Berpolitik dan Nonpartisan	
<i>Framing Devices</i> (perangkat framing)	<i>Reasoning Devices</i> (perangkat penalaran)
<i>Metaphors:</i> Muhammadiyah jangan sampai terserempet politik.	<i>Roots:</i> Muhammadiyah harus menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Tidak ada yang diistimewakan.
<i>Catchphrases:</i> Muhammadiyah tidak memiliki hubungan dengan partai politik mana pun.	<i>Appeal to Principles:</i> Banyak tokoh Muhammadiyah yang menjadi pilar di parpol, namun bukan berarti Muhammadiyah berpolitik.
<i>Exemplar:</i> Muhammadiyah dan PAN memang tidak memiliki hubungan organisatoris dan hubungan struktural, tapi ada hubungan kesejarahan.	<i>Consequences:</i> Ke depan, ormas ini akan lebih fokus pada pengembangan program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keagamaan, sesuai cita-cita pendirinya.
<i>Depiction:</i> Jika PAN menghormati Muhammadiyah maka jangan campur tangani Muhammadiyah, biar berkembang. Muhammadiyah juga tidak perlu mengatur PAN.	
<i>Visual Image:</i> -	

BAGIAN 3

REPRESENTASI MUHAMMADIYAH DALAM SURAT KABAR

3.1 Masalah Representasi Muhammadiyah

Pada dasarnya representasi merujuk pada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam media (Eriyanto, 2001: 113). Representasi sangat penting berkaitan dengan apakah seseorang, satu kelompok atau gagasan tertentu ditampilkan sebagaimana mestinya, dan bagaimana representasi dari seseorang, satu kelompok atau gagasan tertentu tersebut ditampilkan.

Menurut Fiske (dalam Eriyanto, 2001: 114), dalam proses menampilkan satu gagasan atau obyek di media, ada tiga tahap atau proses pembentukan gagasan atau obyek tersebut. Pertama, obyek, gagasan, atau peristiwa yang *dienkode* sebagai sebuah realitas. Kedua, bagaimana realitas obyek atau gagasan tersebut digambarkan; bagaimana fotonya, kalimat yang digunakan dan sebagainya. Ini adalah proses representasi. Ketiga, disebut sebagai proses ideologisasi, yakni bagaimana realitas yang sudah direpresentasikan tersebut diorganisir ke dalam konvensi-konvensi yang diterima secara ideologis. Di sini kode-kode representasi dihubungkan dengan koherensi sosial seperti kelas, kepercayaan, kekuatan tertentu dalam masyarakat (patriarkhi, materialisme, kapitalisme, dan sebagainya).

Praktik-praktik representasi selalu dikaitkan dengan bagaimana bahasa digunakan. Bahasa merupakan instrumen utama dalam praktek representasi, artinya bagaimana seseorang, suatu kelompok, dan sebuah gagasan ditampilkan adalah dengan menggunakan bahasa. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan untuk melihat sebuah representasi adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh media. Selain sebagai instrumen utama representasi, bahasa juga sebagai alat utama media untuk menggambarkan sebuah realitas. Yaitu dengan cara menuliskan sebuah fakta dengan cara-cara tertentu sehingga menimbulkan makna-makna tertentu seperti yang dikehendaki oleh media. Misalnya, sebuah fakta tentang pembakaran tebu oleh petani, dengan penggunaan bahasa-bahasa tertentu peristiwa tersebut bisa bermakna sebagai bentuk anarkisme petani. Padahal, dengan pemilihan bahasa-bahasa yang lain peristiwa tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan petani yang tertindas oleh sistem yang tidak memihak mereka (Eriyanto, 2001: 117).

Praktek representasi yang tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya ini dapat memunculkan misrepresentasi. Misrepresentasi adalah kesalahan penggambaran tentang seseorang, kelompok, atau sebuah gagasan. Mereka tidak digambarkan sebagaimana mestinya tapi digambarkan secara buruk atau negatif. Beberapa bentuk praktik misrepresentasi adalah pertama,

ekskomunikasi. Ekskomunikasi berhubungan dengan bagaimana seseorang atau suatu kelompok dikeluarkan dari pembicaraan publik. Karena ia dianggap lain, bukan bagian dari kita (Eriyanto, 2001: 121).

Praktik misrepresentasi yang kedua adalah *eksklusi*. Eksklusi berhubungan dengan bagaimana seseorang atau kelompok dikucilkan dalam pembicaraan. Mereka dibicarakan dan diajak bicara tapi mereka dipandang lain karena dianggap bukan bagian dari kita. Ketiga adalah dengan *marjinalisasi*, yakni penggambaran buruk kepada pihak atau kelompok lain sebagai akibat dari praktik ekskomunikasi dan eksklusi. Praktik marjinalisasi ini banyak dilakukan oleh media terutama dalam pemberitaan tentang perempuan. Perempuan di media banyak digambarkan secara buruk, dan direpresentasikan sebagai pihak yang tidak berani, kurang inisiatif, tidak rasional, dan lebih sensitif. Cara-cara marjinalisasi yang lazim dipakai media adalah dengan penghalusan makna (*eufemisme*), pengasaran makna (*disfemisme*), labelisasi, dan dengan menggunakan stereotipe (Eriyanto, 2001: 122-126).

Berkaitan dengan penelitian ini, praktik marjinalisasi dengan stereotipe ini yang akan banyak diulas. Seperti yang disebutkan di atas bahwa salah satu sebab adanya representasi yang salah adalah karena adanya stereotipe, yakni praktik representasi yang menggambarkan sesuatu dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif dan bersifat subyektif. Menurut Samovar dan kawan-kawan (1981: 22), *stereotipe* adalah “kepercayaan-kepercayaan (*beliefs*) atas dasar penyimpulan yang dilebih-lebihkan yang diasosiasikan dengan kategori-kategori tertentu suatu kelompok atau masyarakat”. Stereotipe ini muncul dan berkembang di tengah masyarakat karena pertama, adanya proses pembelajaran dari orangtua dan teman sepergaulan. Kedua, pengalaman pribadi, dan yang paling menentukan adalah karena faktor media massa.

Pada dasarnya teks-teks yang ditampilkan oleh media massa, termasuk film secara ideologis mempunyai fungsi sebagai sarana untuk di satu sisi mengunggulkan diri sendiri dan kelompoknya dan di sisi lain memarjinalkan orang dan kelompok lain. Di sini representasi dapat dipahami sebagai suatu mode untuk membongkar kepentingan-kepentingan ideologis media. Menurut Cavallaro (2004: 75), setiap representasi dapat didekati sebagai sebuah teks atau sistem tanda yang menandakan sesuatu. Penting juga dipahami adanya keterpautan antara representasi dengan ideologi karena fenomena ini bukan fenomena kontemporer tapi sudah terjadi sejak lama.

Berkaitan dengan hal tersebut, di sini akan dikaji pertama bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ditampilkan di surat kabar? Kedua, apakah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sudah ditampilkan sebagaimana mestinya? Berdasarkan hasil analisis isi sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.5, ada beberapa isu yang ditonjolkan oleh surat kabar

mengenai Muhammadiyah selama muktamar ke-46. Isu-isu tersebut adalah mengenai peran Muhammadiyah, hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah (negara), keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah, hubungan Muhammadiyah dengan politik praktis, dan isu mengenai regenerasi di tubuh Muhammadiyah. Isu-isu tersebut kemudian dianalisis dengan analisis framing sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Dari hasil analisis framing tersebut dapat dipahami mengenai representasi Muhammadiyah di surat kabar.

Permasalahan pertama berkaitan dengan representasi Muhammadiyah adalah bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ditampilkan di surat kabar? Berdasarkan hasil analisis framing ada beberapa representasi Muhammadiyah di surat kabar terutama berkaitan dengan isu-isu yang ditonjolkan. Pertama mengenai peran Muhammadiyah di mana Muhammadiyah direpresentasikan sebagai gerakan pencerahan. Dalam isu ini Republika dalam berita berjudul "*Muhammadiyah sebagai Gerakan Pencerahan*" (4/7/2010) mengutip pernyataan Haedar Nashir:

"Revitalisasi yang kita butuhkan untuk abad kedua ini adalah gerakan yang lebih progresif melalui transformasi gerakan Muhammadiyah, yakni lebih fokus sebagai gerakan pencerah. Pencerahan merupakan sebuah proses progresif mulai dari akar rumput hingga tingkat atas".

Republika juga merepresentasikan Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan dalam berita yang berjudul "*Pembawa Misi Islam*" (4/7/2010). Pada berita tersebut Republika mengutip pernyataan Presiden SBY sebagai berikut: "*gerakan Muhammadiyah telah membawa pencerahan dan pembaruan pemikiran umat Islam sehingga tak berlebihan apabila Muhammadiyah berhasil memperbaiki suasana intelektual kaum Muslimin di tanah air*".

Sedangkan Kompas pada isu yang sama juga menulis mengenai representasi Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan dalam berita, "*Negara-Muhammadiyah Saling Membutuhkan*" (4/7/2010). Pada berita tersebut Kompas juga mengutip pendapat Presiden SBY saat membuka muktamar Muhammadiyah melalui telekonferensi dari Madina berikut:

"Kurun waktu satu abad, Muhammadiyah tumbuh menjadi organisasi kemasyarakatan besar yang terus bergerak ke depan membangun pendidikan, kesehatan, dan sosial. Muhammadiyah juga berperan aktif dalam pergaulan global, membangun dialog antarperadaban".

Media Indonesia merepresentasikan Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan dalam beritanya berjudul "*Din Janji Muhammadiyah Tetap Kritis*" (8/7/2010). Dalam berita tersebut Media Indonesia mengutip pendapat Arie Sujito, Pengamat Politik UGM yang menyatakan: "*Muhammadiyah sebaiknya menegaskan posisinya sebagai organisasi yang mengemban usaha pemberdayaan masyarakat, pencerahan, dan kesejahteraan umat. Jangan lagi merapat ke capres atau cawapres*".

Kedua, pada isu mengenai hubungannya dengan pemerintah Muhammadiyah direpresentasikan oleh surat kabar sebagai organisasi yang loyal-kritis terhadap pemerintah. Secara jelas surat kabar menampilkan hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah selama ini baik dan proporsional. Representasi Muhammadiyah berkaitan dengan isu ini misalnya dapat dilihat di *Republika* yang dimuat dalam berita berjudul *“Din Pimpin Lagi Muhammadiyah”* (8/7/2010). Di sini *Republika* menampilkan pendapat Din Syamsuddin mengenai hubungan organisasi yang dipimpinnya dengan pemerintah, *“Siapapun presidennya dan pemerintahannya, kita tetap loyal. Tapi, Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah amar makruf nahi munkar tetap akan mengkritik pemerintah jika melakukan kesalahan”*. Pada berita lain yang berjudul *“Jaga Amanat Mukhtar”* (8/7/2010) *Republika* juga menyatakan pendapat A. Syafii Maarif, *“Muhammadiyah harus tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau dikritik, pemerintah harus berjiwa besar, Muhammadiyah juga harus begitu”*.

Media Indonesia merepresentasikan Muhammadiyah dalam isu hubungannya dengan pemerintah secara loyal-kritis. Media Indonesia mengutip pernyataan Din Syamsuddin dalam berita berjudul *“SBY Minta Majukan Islam yang Ramah”* (4/7/2010) yang isinya berikut: *“jika pemerintah benar menjalankan pemerintahan, Muhammadiyah berada di depan membela. Tapi jika menyimpang, Muhammadiyah mengkritisnya”*.

Sedangkan *Kompas* dalam isu ini juga merepresentasikan hubungan Muhammadiyah dan pemerintah tidak mungkin tidak baik. Pada beritanya yang berjudul *“Negara-Muhammadiyah Saling Membutuhkan”* (4/7/2010) *Kompas* menulis pernyataan Din Syamsuddin, *“Tidak mungkin ada pertentangan antara Muhammadiyah dan pemerintah. Sebagai gerakan mencerdaskan bangsa, Muhammadiyah butuh negara. Sebaliknya, negara juga memerlukan peran Muhammadiyah”*.

Representasi Muhammadiyah di surat kabar yang ketiga adalah berkaitan dengan isu mengenai keterwakilan perempuan (Aisyiyah) di PP Muhammadiyah. Pada isu ini surat kabar terlihat berbeda dalam merepresentasikan Muhammadiyah. *Kompas* menampilkan Muhammadiyah dalam isu ini sebagai organisasi yang tertutup bagi perempuan, terutama di tingkat PP Muhammadiyah. Hal itu disebabkan karena perempuan di Muhammadiyah sudah mempunyai Aisyiyah, organisasi otonom Muhammadiyah yang mewadahi perempuan. Seperti yang terlihat pada berita berjudul *“Politisi Masuk Bursa Calon”* (3/7/2010), *Kompas* mengutip pendapat salah seorang ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas, *“Perempuan Muhammadiyah sudah punya Aisyiyah sehingga mereka lebih konsentrasi di sana”*. Tidak terakomodasinya perempuan di PP Muhammadiyah membuat PP Aisyiyah melayangkan nota keberatan kepada PP Muhammadiyah

karena seperti yang dinyatakan oleh Trias Setiawati, Sekretaris PP Aisyiyah, *“kontribusi Aisyiyah tidak dibargai dalam kepemimpinan kolektif Persyarikatan Muhammadiyah”* (5/7/2010).

Sedangkan Media Indonesia merepresentasikan Muhammadiyah dalam isu keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah berbeda dengan Kompas. Media Indonesia justru menampilkan Muhammadiyah sebagai organisasi yang mengakomodir perempuan. Seperti yang ditulis oleh Media Indonesia dalam berita berjudul *“Muhammadiyah Dikuasai Laki-laki”* (6/7/2010), yang mengutip pernyataan Haedar Nashir berikut: *“masih ada peluang untuk memodifikasi anggota pimpinan tersebut, misalnya dengan menambah anggota perempuan atau melalui majelis-majelis yang dimiliki”*. Pada berita yang sama Media Indonesia juga menyitir pendapat A. Syafii Maarif, *“sudah saatnya Muhammadiyah mengakomodasi kader perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan”*. Selain itu, Media Indonesia menulis pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah terpilih, Din Syamsuddin bahwa perempuan akan menempati posisi-posisi strategis sesuai dengan kebutuhan organisasi (9/7/2010).

Representasi Muhammadiyah di surat kabar selanjutnya adalah berkaitan dengan hubungan Muhammadiyah dengan politik praktis. Dalam isu ini surat kabar merepresentasikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bersikap netral terhadap politik (nonpartisan). Representasi Muhammadiyah yang tidak berpolitik dan nonpartisan ini dapat dilihat dari beberapa pemberitaan surat kabar mengenai Muhammadiyah selama muktamar. Seperti yang ditulis Suara Pembaruan dalam berita berjudul *“Muhammadiyah Nonpartisan”* (6/7/2010), dalam berita tersebut Suara Pembaruan mengemukakan pendapat beberapa tokoh Muhammadiyah yang menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik. Misalnya pernyataan Din Syamsuddin, *“posisi politik Muhammadiyah adalah netral kepada semua parpol, termasuk PAN, bahkan dengan pemerintah”*. Juga pendapat A. Syafii Maarif, *“Muhammadiyah harus menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Tidak ada yang diistimewakan”*. Abdul Mu'ti juga menyatakan bahwa banyak tokoh Muhammadiyah yang menjadi pilar di parpol, namun bukan berarti Muhammadiyah berpolitik.

Pada berita yang lain semakin memperkuat representasi Muhammadiyah sebagai organisasi nonpolitik atau nonpartisan. Suara Pembaruan menulis dalam berita berjudul *“Muhammadiyah Pastikan Tak Berpolitik”* (8/7/2010) yang isinya di antaranya berupa kutipan pernyataan Din Syamsuddin berikut: *“Muhammadiyah tidak memiliki hubungan dengan partai politik mana pun”*. Begitu juga A. Syafii Maarif yang mengingatkan Muhammadiyah untuk berhati-hati dengan politik: *“Muhammadiyah ke depan agar berhati-hati dalam melangkah, terutama terhadap godaan*

politik. Pengalaman 2004 dan 2009 jangan sampai terulang pada Pemilu 2014. Muhammadiyah jangan sampai terserempet politik”.

Pada isu yang sama, Kompas juga merepresentasikan Muhammadiyah dalam hubungannya dengan politik sebagai organisasi yang menjaga jarak yang sama dengan politik. Seperti yang ditulis Kompas dalam berita *“Din Syamsuddin Ketua Umum Lagi”* (8/7/2010) yang memuat pernyataan beberapa tokoh Muhammadiyah, di antaranya A Syafii Maarif: *“pimpinan baru Muhammadiyah untuk tidak mendekati politik praktis. Pimpinan bendaknya lebih mengedepankan kepentingan persyarikatan”.* Sedangkan Busyro Muqoddas menyatakan bahwa *“para pimpinan harus menjaga jarak dan memiliki hubungan proposional, etis, dan sinergis dengan semua partai politik. Muhammadiyah tidak perlu terlibat dalam dukung mendukung dengan partai politik atau calon presiden dan wakil presiden tertentu”.* Secara lebih tegas Din Syamsuddin mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan dengan partai politik mana pun, termasuk Partai Amanat Nasional. *“Kami tetap tidak punya hubungan dengan parpol”.*

Sedangkan Republika dan Koran Tempo hampir sama dengan Suara Pembaruan dan Kompas, yang merepresentasikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang tidak berpolitik praktis. Sebagaimana yang ditulis Republika dalam berita *“Muhammadiyah tak Masuk Politik”* (9/7/2010) yang menyitir pendapat Muhammad Muqoddas *“Kami sepakat jika ada anggota yang tergoda dunia politik maka akan diberhentikan”.* Sedangkan Koran Tempo menulisnya pada berita berjudul *“Din Syamsuddin Janjikan Muhammadiyah Tak Berpolitik”* (9/7/2010), di mana Koran Tempo menyatakan pendapat Din Syamsuddin berikut: *“Jika masuk arus politik, maka sangat berpotensi menumbulkan masalah. Kami tidak terlibat politik praktis, tidak mengusung calon tertentu, tapi politik kebangsaan Khittab Tanwir Denpasar, amar ma’ruf nahyi munkar”.*

Representasi Muhammadiyah di surat kabar yang terakhir adalah berkaitan dengan isu regenerasi di tubuh Muhammadiyah. Dalam isu ini Muhammadiyah direpresentasikan oleh surat kabar sebagai organisasi gagal dalam proses regenerasi kepemimpinannya sehingga kebutuhan regenerasi dan kaderisasi sangat mendesak. Representasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang gagal dalam proses regenerasi dan kaderisasi ini terlihat jelas di Kompas. Dalam berita berjudul *“Wajah Lama Kuasai Muhammadiyah”* (7/7/2010) Kompas mengemukakan pendapat Hamdi Muluk, Guru Besar Ilmu Psikologi Politik UI berikut:

“Banyaknya pengurus lama dan tokoh konservatif dalam paham keagamaan yang masuk jajaran kepengurusan baru Muhammadiyah menunjukkan gagalnya regenerasi. Pembaruan yang menjadi agenda besar Muhammadiyah abad kedua juga dikhawatirkan akan mengalami kemandekan”.

Pada berita lain yang berjudul *“Muhammadiyah Butuh Regenerasi”* (5/7/2010) Kompas juga menulis mengenai kekhawatiran mandeknya regenerasi dan kaderisasi di tubuh Muhammadiyah. Pada berita tersebut Kompas mengutip pernyataan Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif Maarif Institute, yang menyatakan bahwa Muhammadiyah akan sulit terhindar dari krisis institusional jika kepentingan kaderisasi dan regerasi diabaikan dalam muktamar. Pendapat senada juga diutarakan oleh Asep Purnama Bachtiar, Kepala Pusat Studi Muhammadiyah dan Perubahan Sosial Politik UMY, *“banyaknya anggota PP Muhammadiyah yang dicalonkan lagi itu mencerminkan ada masalah dalam pembinaan organisasi”*.

Sedangkan Media Indonesia merepresentasikan Muhammadiyah berkaitan dengan mendesaknya kebutuhan bagi Muhammadiyah untuk melakukan regenerasi dan kaderisasi. Media Indonesia dalam beritanya yang berjudul *“Muhammadiyah Jangan Jadi Panti Jompo”* (6/7/2010), yang mengutip pernyataan Ton Abdillah Has, Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), *“tokoh senior dan guru moral tetap diperlukan, tapi kalau berlebihan, nanti bisa dilibat Muhammadiyah jadi panti jompo. Sudah saatnya diisi tokoh muda. Jangan sampai Muhammadiyah menjadi penampungan bekas menteri”*. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Deni Wahyudi Kurniawan, Ketua DPP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang menuturkan, *“kami berharap 70% kepemimpinan adalah generasi muda. Muda dalam arti di bawah 50 tahun. Harapannya mereka memiliki pengalaman yang kontekstual dan bisa membuat Muhammadiyah lebih baik, tidak antiperubahan, serta bisa berinovasi”*.

Berkaitan dengan permasalahan representasi Muhammadiyah yang kedua adalah apakah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sudah ditampilkan sebagaimana mestinya di surat kabar? Bila disimak uraian di atas maka representasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sudah ditampilkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan representasi Muhammadiyah yang dikaitkan dengan beberapa isu yang menonjol dalam pemberitaan surat kabar selama muktamar menunjukkan apa yang direpresentasikan surat kabar merupakan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan atau diposisikan oleh Muhammadiyah. Permasalahannya adalah apakah yang sudah ditentukan itu dapat dilakukan oleh Muhammadiyah atau tidak.

Pada isu mengenai peran Muhammadiyah di mana surat kabar merepresentasikan Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan merupakan *“identitas”* yang selama ini diidentikkan dengan Muhammadiyah oleh orang atau kelompok lain. Muhammadiyah sendiri sepertinya tidak merasa keberatan menerima identitas itu. Meskipun secara eksplisit dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) dan Kepribadian Muhammadiyah sendiri tidak pernah disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pencerahan. Identitas itu muncul dan

dilekatkan oleh masyarakat bersama dengan kiprah panjang Muhammadiyah di tengah masyarakat dan bangsa melalui berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang diakui telah mencerahkan masyarakat.

Dari perspektif yang lain, Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan merupakan implikasi langsung dari *tajdid* (pembaharuan) di berbagai bidang yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah selama ini. Dalam bidang pendidikan misalnya, *tajdid* yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah menciptakan sistem pendidikan yang hybrid, yakni mengombinasikan pendidikan agama dan pendidikan umum yang komprehensif yang kemudian dianut oleh berbagai institusi lain. Begitu juga di bidang-bidang yang lain, Muhammadiyah melakukan *tajdid* yang kemudian berujung pada pencerahan atau penemuan perspektif baru dalam berbagai bidang tersebut.

Sedangkan mengenai isu hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah memang sebelumnya sempat mengalami disharmoni. Beberapa analisis menyebutkan disharmoni hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah merupakan imbas dari sikap politik pribadi Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pada waktu Pemilihan Presiden 2009. Pada Pilpres tersebut Din Syamsuddin membawa Muhammadiyah untuk lebih *mendorse* (mendukung) pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, daripada pasangan SBY-Boediono. Karena ternyata yang menang Pilpres adalah pasangan SBY-Boediono maka Muhammadiyah mau tidak mau harus menanggung resiko atas sikap politiknya, yakni “dimusuhi” oleh SBY.

Meskipun demikian, dalam isu ini ternyata surat kabar merepresentasikan hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah baik dan proporsional, atau dalam istilah lain loyal-kritis. Apa yang direpresentasikan oleh surat kabar mengenai Muhammadiyah pada dasarnya sesuai dengan khittah perjuangan Muhammadiyah. Dalam Khittah Denpasar tahun 2002³ nomor 5 dinyatakan bahwa *“Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar makruf nabi munkar dengan jalan memengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa”*. Selain itu, pada nomor 9 juga disebutkan bahwa *“Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak dan golongan manapun berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis, dan berkeadaban”*.

Pada isu mengenai keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah, surat kabar merepresentasikan Muhammadiyah dengan dua perrepresentasian yang berbeda. Di satu sisi

³ Lihat “Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah, dan Langkah”, diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, tahun 2010 hal. 386-387.

Muhammadiyah direpresentasikan sebagai organisasi yang *mahjub* (tertutup) bagi perempuan, terutama di tingkat pengurus pusat (PP) Muhammadiyah. Di sisi yang lain, Muhammadiyah juga direpresentasikan sebagai organisasi yang siap mengakomodasi perempuan di tingkat PP Muhammadiyah sekalipun. Dua wajah yang direpresentasi oleh surat kabar mengenai Muhammadiyah tersebut pada prinsipnya sama benarnya dalam konteks yang berbeda.

Bila PP Muhammadiyah dianggap tertutup bagi perempuan hal itu lebih disebabkan selama ini memang belum pernah ada perempuan yang terpilih duduk di PP Muhammadiyah. Meskipun dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 10 ayat 2 dinyatakan bahwa "*anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan*".⁴ Hal demikian mengesankan PP Muhammadiyah memang dikuasai oleh laki-laki. Terlebih lagi dengan adanya pernyataan-pernyataan dari beberapa ketua PP Muhammadiyah yang menyatakan bahwa perempuan Muhammadiyah sudah mempunyai Aisyiyah, salah satu organisasi otonom Muhammadiyah bagi perempuan, dan tidak penting lagi berkiprah di PP Muhammadiyah.

Sedangkan yang menganggap bahwa PP Muhammadiyah terbuka bagi perempuan alasannya karena memang berdasarkan anggaran rumah tangga Muhammadiyah memungkinkan hal itu terjadi. Namun demikian, seperti yang dikemukakan oleh salah satu ketua PP Muhammadiyah, A Malik Fadjar, "*ormas Islam ini telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi anggota pimpinan pusat. Namun ternyata, hasil pemilihan di tanwir tak ada satupun kader perempuan*" (Republika, 3 Juli 2010). Bahkan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin secara tegas juga mengatakan bahwa perempuan akan menempati posisi-posisi strategis sesuai dengan kebutuhan organisasi (Media Indonesia, 9 Juli 2010). Dengan demikian memang telah terjadi kesenjangan antara apa yang diidealkan di anggaran rumah tangga dengan kenyataan yang terjadi di tanwir dan muktamar.

Berkaitan dengan isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik praktis, apa yang direpresentasikan oleh surat kabar bahwa Muhammadiyah bersikap netral, menjaga jarak yang sama, dan nonpartisan merupakan sikap yang sebenarnya dari Muhammadiyah. Dalam hal ini Muhammadiyah telah ditampilkan sebagaimana mestinya sebagai organisasi Islam yang tidak terlibat dalam politik praktis. Sikap tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Khittah Denpasar tahun 2002 yang menyebutkan bahwa "*Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun*". Meskipun demikian, dalam khittah tersebut juga disebutkan bahwa "*Muhammadiyah memberikan kebebasan*

⁴ Lihat "Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah, dan Langkah", diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, tahun 2010 hal. 321.

kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing".⁵

Hubungan Muhammadiyah dengan politik praktis memang sulit dihindari, terutama dengan Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang didirikan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, HM. Amien Rais. Bahkan dalam beberapa kesempatan Amien Rais mengatakan bahwa Muhammadiyah dan PAN tidak akan saling menyinggalkan. Ini dilandasi hubungan sejarah dan aspirasi Muhammadiyah yang tersalurkan melalui PAN (Koran Tempo, 5 Juli 2010). Pernyataan Amien Rais ini langsung ditanggapi oleh Din Syamsuddin yang mengatakan bahwa *"Posisi politik Muhammadiyah adalah netral kepada semua parpol, termasuk PAN"* (Suara Pembaruan, 6 Juli 2010).

Adapun berkaitan dengan isu regenerasi di tubuh Muhammadiyah yang dianggap oleh surat kabar mengalami kegagalan juga merupakan realitas yang tidak dapat disembunyikan. Artinya, apa yang direpresentasikan oleh surat kabar mengenai Muhammadiyah dalam isu regenerasi ini merupakan sesuatu yang riil, diakui atau tidak. Sejauh ini memang belum terlihat kader muda yang visioner kepemimpinan Muhammadiyah di masa depan. Salah satu indikatornya adalah, sebagaimana yang diberitakan oleh Kompas, yang terpilih masuk dalam PP Muhammadiyah merupakan wajah-wajah lama. Hal ini menurut Kompas menunjukkan proses regenerasi dan kaderisasi di tubuh Muhammadiyah tidak berjalan sebagaimana mestinya (Kompas, 7 Juli 2010).

Menurut Din Syamsuddin, proses regenerasi kepemimpinan itu diperkirakan mengandung resiko tinggi. Sebagaimana yang dituturkannya kepada Kompas, *"diperkirakan masih banyak tokoh senior yang ingin masuk lagi. Sementara itu, pimpinan sebagian partai politik kini sudah dipegang oleh anak-anak muda yang kenegarawanannya kurang"*. Selain itu Din Syamsuddin juga mengatakan bahwa saat ini regenerasi di tubuh Muhammadiyah menghadapi dilema, yakni banyak kader yang masuk ke partai politik dengan membawa bendera Muhammadiyah. Din mengatakan:

"Ini dilema yang dihadapi Muhammadiyah yang khitahnya tidak punya hubungan organisatoris dengan partai mana pun. Dilema muncul dari kecenderungan orang Muhammadiyah yang tidak bisa memelihara cintanya kepada Muhammadiyah saat masuk partai politik. Ada yang kecintaannya kepada Muhammadiyah menipis, muncul loyalitas ganda, atau tidak cinta sama sekali dengan Muhammadiyah. Akibatnya, mereka justru membawa nilai politik ke Muhammadiyah" (Kompas, 9 Juli 2010).

⁵ Lihat "Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah, dan Langkah", diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, tahun 2010 hal. 387

Berkaitan dengan praktik representasi Muhammadiyah di surat kabar pada dasarnya apa yang direpresentasikan oleh surat kabar mengenai Muhammadiyah merupakan hasil konstruksi surat kabar mengenai Muhammadiyah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, ada bermacam-macam bentuk representasi mengenai Muhammadiyah tergantung pada isu apa representasi itu dikaitkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman realitas itu berwajah ganda atau plural (Poloma, 1992: 308). Jadi ketika surat kabar mengkonstruksi mengenai Muhammadiyah secara sedemikian rupa melalui praktik perepresentasian pada dasarnya itu hanyalah satu persepektif saja dalam menilai Muhammadiyah. Dengan sendirinya akan muncul perspektif-perspektif lain yang berbeda mengenai Muhammadiyah, dan dalam pandangan konstruktivisme hal yang demikian lumrah saja.

Mengenai faktor-faktor yang menentukan representasi Muhammadiyah di surat kabar, tentu tidak dapat begitu saja digeneralisir. Setiap surat kabar mempunyai kepentingan yang berbeda-beda tergantung banyak faktor, serta tergantung juga dengan hubungan surat kabar dengan obyek berita (Muhammadiyah). Meskipun demikian secara umum ada tiga hal yang dapat disebut sebagai faktor yang menentukan representasi Muhammadiyah di surat kabar. Pertama, keterikatan surat kabar untuk membuat berita yang bersifat seobyektif mungkin sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Kedua, nilai-nilai berita (*news values*) yang menjadi landasan dalam praktik-praktik jurnalisme. Ketiga, faktor ideologis yang sedikit banyak berpengaruh juga terhadap pola pemberitaan surat kabar. Ketiga faktor penentu tersebut merupakan faktor yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

3.2 Wacana-wacana Surat Kabar selama Muktamar

Selama Muktamar Muhammadiyah ke-46, 3-8 Juli 2010 di Yogyakarta, berdasarkan hasil analisis isi surat kabar terdapat ada 24 jenis isu yang diberitakan oleh surat kabar (lihat tabel 2.5). Dari isu-isu tersebut secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis isu, yaitu pertama isu-isu yang menonjol dan mempunyai kontroversi seperti isu mengenai keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah, isu mengenai hubungan Muhammadiyah pemerintah dan politik praktis, dan isu mengenai regenerasi Muhammadiyah. Isu kategori ini telah dianalisis sebagaimana yang dipaparkan di atas. Kedua, isu-isu yang menonjol tapi tidak mempunyai nilai kontroversi, misalnya isu mengenai peran Muhammadiyah, isu mengenai bursa calon ketua PP Muhammadiyah, dan isu mengenai terpilihnya Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Isu kategori ini tidak dikaji secara khusus karena tidak terlalu menarik. Ketiga adalah isu-isu yang kurang menonjol tapi mempunyai nilai kontroversi, contohnya isu mengenai

pencalonan Muchdi Pr sebagai ketua PP Muhammadiyah, isu mengenai intervensi terhadap Muhammadiyah, dan isu mengenai sistem pemilihan ketua umum PP Muhammadiyah.

Dalam pembahasan ini akan dikaji kategori isu yang ketiga, yakni isu-isu yang tidak terlalu ditonjolkan oleh surat kabar tapi dianggap penting. Selain ketiga isu yang sudah disebutkan di atas, isu-isu lainnya dalam kategori ini adalah isu mengenai calon ketua PP Muhammadiyah dari partai politik dan isu mengenai kepemimpinan Muhammadiyah.

Isu mengenai pencalonan Muchdi Pr sebagai ketua PP Muhammadiyah selama muktamar dalam pemberitaan surat kabar memang tidak terlalu banyak hanya 5 berita, itu pun hanya Koran Tempo (3 berita) dan Media Indonesia (2 berita) yang memunculkan isu ini. Sedangkan Kompas, Republika, dan Suara Pembaruan sama sekali tidak memunculkan isu ini. Dalam isu ini Koran Tempo dan Media Indonesia cenderung menonjolkan sisi penolakan terhadap pencalonan Muchdi Pr sebagai ketua PP Muhammadiyah. Seperti yang diutarakan oleh Haris Azhar, Wakil Koordinator KontraS, *"Muchdi tidak pantas menjadi Ketua Umum Muhammadiyah. Sosok seperti dia sama sekali tidak layak"*. Nada penolakan juga dilontarkan oleh Suciwati, Istri mendiang Munir, *"bila akhirnya Muchdi terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, itu akan menjadi aib bagi organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Achmad Dahlan tersebut"* (Koran Tempo, 2 Juli 2010). Dari kalangan internal Muhammadiyah juga muncul ketidaksetujuan terhadap pencalonan Muchdi Pr, seperti yang dikemukakan oleh Andar Nubowo, Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Perancis, *"bagi saya memilih Muchdi terlalu berisiko tinggi bagi Muhammadiyah. Baru masuk daftar 39 calon anggota PP Muhammadiyah saja sudah dikritik, bagaimana nanti jika masuk 13 anggota PP Muhammadiyah"* (Media Indonesia, 5 Juli 2010).

Pencalonan Muchdi Pr sebagai salah satu kandidat ketua PP Muhammadiyah memang kontroversif. Hal ini terkait dengan latar belakang Muchdi Pr yang dianggap mempunyai masalah dengan hukum. Nama Muchdi Pr ini mencuat saat dikaitkan dengan kasus kematian aktivis hak asasi manusia, Munir. Bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini sempat menjadi terdakwa, namun putusan kasasi membebaskannya dari hukuman. Di sisi lain, Muhammadiyah merupakan organisasi massa Islam yang selama ini dikenal bersih, sehingga munculnya nama Muchdi sebagai calon ketua PP Muhammadiyah dinilai bisa mencoreng nama Muhammadiyah terutama di kalangan aktivis hak asasi manusia.

Menanggapi polemik mengenai dirinya Muchdi Pr sendiri tidak banyak berkomentar. Muchdi mengatakan bahwa dirinya siap memimpin jika diberi amanat, (Koran Tempo, 2 Juli 2010). *"Saya lahir dan dibesarkan Muhammadiyah, jadi sekarang ingin mengabdikan pada Muhammadiyah,"* kata Muchdi (Koran Tempo, 3 Juli 2010). Masuknya Muchdi sebagai calon pimpinan pusat

Muhammadiyah sepertinya mendapat dukungan dari kalangan ketua PP Muhammadiyah sendiri. Yunahar Ilyas, salah seorang ketua PP Muhammadiyah membantah adanya titipan dalam pencalonan Muchdi, *“tidak ada titipan. Tidak ada maksud politis. Murni karena kami ingin memberi peluang saja,”* (Koran Tempo, 3 Juli 2010). Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah meminta masyarakat tidak berpolemik mengenai pencalonan Muchdi ini. Din mengatakan, *“masyarakat diminta tidak berpolemik atas masuknya Muchdi Pr sebagai calon anggota PP Muhammadiyah. Kasus hukumnya sudah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Agung”* (Media Indonesia, 5 Juli 2010). Din juga memberikan dukungan kepada Muchdi Pr dengan menyatakan, bahwa Muchdi dinilai memenuhi syarat lantaran dicalonkan dari organisasi otonom Tapak Suci yang dipimpinnya. Memang ada masalah apa? Secara hukum kan tidak bermasalah (Koran Tempo, 5 Juli 2010).

Isu lain yang muncul dan menarik ditanggapi adalah mengenai upaya intervensi terhadap Muhammadiyah. Mengenai isu ini surat kabar memang tidak terlalu menonjolkannya, hanya ada 3 berita mengenai isu ini yang ditampilkan oleh Kompas (1 berita), Republika (1 berita), dan Suara Pembaruan (1 berita). Kecenderungan isi surat kabar secara umum menunjukkan bahwa memang intervensi itu ada, meskipun belum ditemukan bukti secara jelas dan masih berupa analisis. Seperti yang diutarakan oleh Najib Hamid, Sekretaris PWM Jawa Timur, *“intervensi terhadap muktamar itu benar adanya. Baunya memang masih ada tapi hal semacam itu saya yakin akan gagal karena Muhammadiyah mempunyai garis komando yang jelas”* (Republika, 2 Juli 2010). Pendapat Najib Hamid tersebut didukung oleh Zainuddin Maliki, Guru Besar Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya yang mengatakan, *“intervensi terhadap Muhammadiyah, baik dari kekuasaan, partai politik, maupun kekuatan politik lain sangat mungkin. Sebab, Muhammadiyah itu sekalipun organisasi sosial kemasyarakatan-keagamaan, tetapi merupakan energi politik yang sangat besar”* (Kompas, 7 Juli 2010).

Intervensi terhadap Muhammadiyah melalui muktamar ini sangat mungkin terjadi karena sebagai organisasi massa Islam, Muhammadiyah mempunyai basis pendukung yang besar dan riil. Menurut Burhanuddin Muhtadi, Pengamat Politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), *“eksistensi Muhammadiyah memang membuat parpol mendekat dan ingin menitipkan kader mereka di dalamnya”*. Dari partai politik sendiri menyatakan bahwa sebagai ormas yang berusia satu abad dan telah melahirkan banyak tokoh politik, Muhammadiyah memang memiliki pengaruh yang cukup penting, demikian dinyatakan Mahfudz Siddiq, Wakil Sekjen DPP PKS (Suara Pembaruan, 3 Juli 2010). Meskipun ada upaya-upaya intervensi yang dilakukan pihak luar terhadap Muhammadiyah, namun banyak kalangan juga percaya bahwa Muhammadiyah akan mampu menepis intervensi itu. Seperti yang ditegaskan oleh Syafii Anwar, Tokoh Muhammadiyah dan

Direktur Eksekutif International Center for Islam and Pluralism (ICIP), *“saya percaya, orang Muhammadiyah cukup cerdas dan arif dalam menentukan siapa pemimpin mereka. Jadi saya tidak yakin adanya intervensi politik di dalam proses pemilihan”* (Suara Pembaruan, 3 Juli 2010).

Selain isu mengenai intervensi terhadap Muhammadiyah, isu lain yang juga sempat mencuat adalah mengenai adanya beberapa calon ketua PP Muhammadiyah yang berlatarbelakang politik. Dari segi jumlah isu ini memang tidak terlalu signifikan, hanya 3 berita yang dimuat di Kompas, Koran Tempo, dan Republika yang masing-masing 1 berita. Adanya beberapa calon ketua PP Muhammadiyah dari partai politik ini dapat dilihat pada isi berita Republika (2/7/2010) sebagai berikut, *“nama calon yang memiliki kaitan dengan parpol di antaranya Imam Addaruqutni. Ia merupakan ketua Partai Matahari Bangsa (PMB). Selain itu, ada Muchdi PR, wakil ketua umum Partai Gerindra dan pengurus DPW PPP DI Yogyakarta, Syukri Fadholi”*.

Menanggapi hal ini, beberapa kalangan menghimbau mereka untuk menentukan sikap, mengundurkan diri dari pencalonan atau mundur dari kancah partai politik. Seperti yang dikatakan oleh Bachtiar Effendy, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, *“pengurus Muhammadiyah yang berpartai politik diminta mengundurkan diri dari bursa pencalonan”* (Koran Tempo, 4 Juli 2010). Bila tetap tidak menentukan sikap dan tetap maju mencalonkan diri maka peserta muktamar yang tidak akan memilih mereka. Seperti yang dikatakan Syafii Anwar, *“peserta Muktamar Muhammadiyah adalah orang yang bijak dan cerdas. Mereka pasti tak akan memilih orang yang mencari ‘perlindungan’ dan popularitas di Muhammadiyah”* (Kompas, 3 Juli 2010).

Isu lain yang juga menjadi wacana surat kabar adalah isu mengenai sistem pemilihan ketua PP Muhammadiyah. Mengenai isu ini hanya Republika yang memuatnya dalam 3 berita. Dari tiga berita tersebut 2 di antaranya mengenai pembatasan periode PP Muhammadiyah dan mengenai penambahan jumlah anggota PP Muhammadiyah. Sedangkan 1 berita lainnya mengenai prosedur pemilihan ke-13 anggota PP Muhammadiyah. Isu mengenai pembatasan periode PP Muhammadiyah digagas oleh Hajriyanto Thohari, Kader Muhammadiyah dan Ketua Lazis Muhammadiyah, yang mengatakan bahwa pembatasan periode kerja tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses regenerasi dan kaderisasi di jajaran kepemimpinan. Menurut Hajriyanto, selama ini pembatasan periode kerja baru diterapkan pada tingkat ketua umum, sementara di jajaran wakil ketua dan 11 pimpinan pusat lainnya belum diterapkan aturan yang sama (Republika, 6 Juli 2010).

Sedangkan berkaitan dengan penambahan jumlah anggota PP Muhammadiyah diutarakan oleh Izzul Muslimin, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Menurut Izzul, idealnya, ada

tambahan enam atau tujuh personel baru. Mereka bisa diambil dari calon tetap PP yang sebelumnya terpilih dalam sidang tanwir atau di luar itu (Republika, 8 Juli 2010).

Isu lain yang juga muncul selama muktamar di surat kabar adalah isu mengenai kepemimpinan di Muhammadiyah. Selama muktamar isu ini dimuat sebanyak 4 kali, masing-masing 2 kali di Republika dan Kompas. Kecenderungan isi dari isu kepemimpinan Muhammadiyah ini berkaitan dengan masalah formasi kepengurusan yang idealnya mengkombinasikan generasi tua dan generasi muda, dan mengenai kriteria pemimpin Muhammadiyah yang layak dipilih. Mengenai kepemimpinan kombinasi generasi tua-muda tersebut didukung oleh mantan ketua PP Muhammadiyah HM. Amien Rais yang menyatakan bahwa pemimpin dengan usia tua dan muda sangat diperlukan untuk menjadi satu agar pertumbuhan kaderisasi lebih cepat lagi. Meskipun demikian, generasi muda diberi kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam kepemimpinan Muhammadiyah mendatang, seperti yang disampaikan Iki Stabah Pujiana, seorang Figur Muda Muhammadiyah, *“diharapkan kalangan muda muda Muhammadiyah bisa terakomodasi di PP Muhammadiyah”* (Republika, 4 Juli 2010).

Sedangkan berkaitan dengan kriteria ketua umum Muhammadiyah, surat kabar memuat beberapa pernyataan dari tokoh Muhammadiyah. Misalnya yang disampaikan oleh Suyatno, Rektor UHAMKA Jakarta, *“saya kira di masa depan Muhammadiyah serta umat dan bangsa harus dikawal dengan pendekatan keulamaan dan intelektual”*. Sedangkan Dadang Kahmad, Ketua PWM Jawa Barat menambahkan dengan mengatakan, *“kepemimpinan Muhammadiyah masa depan harus lebih bersifat responsif. Yakni kepemimpinan yang memiliki kepekaan terhadap problem dan isu-isu global, nasional, dan internal Muhammadiyah”* (Republika, 5 Juli 2010). Mengenai kriteria pemimpin Muhammadiyah yang harus dipilih, secara lebih jelas Bachtiar Effendy, Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan *“Muhammadiyah membutuhkan pemimpin yang bisa menjawab tantangan masa depan. Pemimpin harus memiliki kapasitas, jaringan yang kuat, tidak gagap, dan tidak takut berhubungan dengan kalangan internasional”* (Kompas, 6 Juli 2010).

Wacana-wacana yang ditampilkan oleh surat kabar di atas merupakan wacana yang tidak dominan atau tidak menonjol mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam selama muktamar. Meskipun demikian, wacana-wacana tersebut penting untuk dikaji karena mempunyai nilai kontroversi. Dalam framing penting juga diketahui selain isu-isu yang ditonjolkan juga isu-isu yang tidak ditonjolkan atau isu yang dimarginalisasikan (dipinggirkan) dan isu-isu yang diexclude (dibuang). Dengan begitu, analisis framing terhadap suatu permasalahan dapat dipahami secara lebih komprehensif.

3.3 Kritik-kritik Media terhadap Muhammadiyah

Dalam pemberitaannya mengenai Muhammadiyah selama muktamar ke-46 di Yogyakarta, surat kabar tidak hanya merepresentasikan Muhammadiyah secara positif, yakni Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang sebagaimana mestinya. Dalam beberapa pemberitaannya selama muktamar surat kabar juga memberikan kritik-kritik terhadap Muhammadiyah. Beberapa isu yang menjadi sasaran kritik surat kabar di antaranya isu mengenai keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah, regenerasi Muhammadiyah, kepemimpinan Muhammadiyah, peran Muhammadiyah, dan isu mengenai keterbukaan Muhammadiyah.

Berkaitan dengan isu keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah, surat kabar menampilkan beberapa kritik di antaranya yang disampaikan oleh Trias Setiawati, Sekretaris PP Aisyiyah, yang mengatakan, *“organisasi Muhammadiyah yang cerdas, kritis, dan modern, tidak tervermin dalam ekspresi pemilihan anggota PP Muhammadiyah yang tidak mengakomodasi unsur perempuan”*. Menurutnya, dengan tidak masuknya perempuan dalam PP Muhammadiyah menunjukkan bahwa kontribusi Aisyiyah tidak dihargai dalam kepemimpinan kolektif Persyarikatan Muhammadiyah (Kompas, 5 Juli 2010). Untuk itu Trias melalui Aisyiyah mendesak agar sistem pemilihan anggota PP Muhammadiyah serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah diubah demi memunculkan keseimbangan dalam menempatkan keanggotaan pimpinan laki-laki dan perempuan (Suara Pembaruan, 5 Juli 2010).

Mengenai isu keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah ini, A. Syafi'i Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, juga menyatakan bahwa selama ini Muhammadiyah dikuasai oleh kader laki-laki. Untuk itu Syafi'i Maarif menyarankan bahwa sudah saatnya Muhammadiyah mengakomodasi kader perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan (Media Indonesia, 6 Juli 2010).

Kritik lainnya terhadap Muhammadiyah yang muncul di surat kabar adalah mengenai regenerasi dan kaderisasi di tubuh Muhammadiyah yang dianggap gagal. Beberapa pernyataan yang bernada kritik disampaikan beberapa kalangan, baik dari dalam atau pun luar Muhammadiyah. Dari kalangan Muhammadiyah, kritik mengenai regenerasi di tubuh Muhammadiyah dilontarkan oleh Ton Abdillah Has, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), *“tokoh senior dan guru moral tetap diperlukan, tapi kalau berlebihan, nanti bisa dilibat Muhammadiyah jadi panti jompo. Sudah saatnya diisi tokoh muda. Jangan sampai Muhammadiyah menjadi penampungan bekas menteri”* (Media Indonesia, 6 Juli 2010).

Hal senada juga disampaikan oleh Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif Maarif Institute, yang menyatakan bahwa Muhammadiyah akan sulit terhindar dari krisis institusional jika

kepentingan kaderisasi dan regenerasi diabaikan dalam muktamar. Menurut Fajar, *“saat ini Muhammadiyah terjebak dalam pelembagaan birokratisasi yang pragmatis, sementara semangat pembaruan yang merupakan motor penggerak organisasi mulai menipis”*. Asep Purnama Bachtiar, Kepala Pusat Studi Muhammadiyah dan Perubahan Sosial Politik UMY, menyatakan bahwa banyaknya anggota PP Muhammadiyah yang dicalonkan lagi itu mencerminkan ada masalah dalam pembinaan organisasi (Kompas, 5 Juli 2010).

Dari kalangan luar juga melontarkan kritik terhadap Muhammadiyah berkaitan dengan regenerasi dan kaderisasi di tubuh Muhammadiyah. Seperti yang dilontarkan oleh Yudi Latief, Anggota Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society, yang menyatakan krisis kaderisasi di Muhammadiyah adalah karena warganya terjebak dalam nama-nama besar elitnya. *“Nama besar bukan jaminan untuk mampu membawa Muhammadiyah menuju pembaruan (tajdid) memasuki abad ke-2 berdirinya Muhammadiyah”*, tutur Yudi Latief (Kompas, 5 Juli 2010). Sedangkan Hamdi Muluk, Guru Besar Ilmu Psikologi Politik UI, memberi kritikan dengan mengatakan:

“banyaknya pengurus lama dan tokoh konservatif dalam paham keagamaan yang masuk jajaran kepengurusan baru Muhammadiyah menunjukkan gagalnya regenerasi. Pembaruan yang menjadi agenda besar Muhammadiyah abad kedua juga dikhawatirkan akan mengalami kemandekan” (Kompas, 7 Juli 2010).

Sedangkan berkaitan dengan kepemimpinan Muhammadiyah juga tidak lepas dari kritikan surat kabar. Menurut Burhanuddin Muhtadi, Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) selama ini Muhammadiyah kurang bisa menjaga jarak dari politik praktis. Burhanuddin mengatakan:

“Apabila Din kembali terpilih memimpin Muhammadiyah, organisasi itu tak akan berubah jauh dari sebelumnya. Hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah akan terus mengalami pasang surut, dan kurang bisa menjaga jarak dari politik praktis. Namun, kiprahnya di dunia internasional dalam gerakan penegakan hak asasi manusia dan toleransi antarumat beragama cukup baik” (Kompas, 6 Juli 2010).

Mengenai singgungan Muhammadiyah dengan dunia politik praktis selama ini juga menjadi perhatian Said Tuhuleley, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah. Said menyatakan bahwa Banyak pimpinan yang membawa Muhammadiyah dalam kegiatan politik praktis. Namun itu dinilai sebagai kecenderungan perilaku individual elit, bukan sikap Muhammadiyah secara organisatoris. *“Sikap individual itu kini menjadi persoalan karena sebagian besar kader terbaik Muhammadiyah lebih tertarik terjun dalam politik praktis daripada mengelola urusan kemanusiaan yang menjadi bidang kerja Muhammadiyah”* (Kompas, 7 Juli 2010).

Sedangkan mengenai kepemimpinan Muhammadiyah dalam kaitannya dengan pemerintah juga tidak luput dari kritikan. Seperti yang dikemukakan oleh Hyung Jun-Kim,

Peneliti Muhammadiyah dari Universitas Nasional Kangwon, Korea Selatan, yang merasa janggal dengan sikap warga Muhammadiyah. *“Kondisi ini memang janggal. Mereka (pengurus daerah) mendukung Pak Din karena sikapnya yang keras sebagai oposisi pemerintah. Namun mereka juga mendukung pemerintah, tak mau oposisi. Sepertinya mereka ingin mendapatkan dua-duanya”* (Kompas, 8 Juli 2010). Lebih lanjut, Kim mengatakan:

“Ketika mengetahui Din Syamsuddin meraih suara terbanyak, saya beranggapan Muhammadiyah akan mengambil langkah lebih kritis terhadap pemerintah. Namun yang terjadi adalah sebagian besar muktamirin menginginkan bekerja sama dengan pemerintah. Saya tidak habis pikir dengan warga Muhammadiyah ini” (Suara Pembaruan, 7 Juli 2010).

Kritikan yang dimunculkan surat kabar terhadap Muhammadiyah selama muktamar yang lain adalah berkaitan dengan peran Muhammadiyah sendiri. Beberapa bentuk kritik yang berkaitan dengan peran Muhammadiyah itu di antaranya disampaikan oleh Imam Suprayogo, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Imam menyatakan bahwa Muhammadiyah yang kini berusia satu abad masih fokus pada kegiatan ritual belaka, padahal cita-cita pendirinya, KH Ahmad Dahlan, adalah menjadikan organisasi ini sebagai gerakan sosial (Media Indonesia, 3 Juli 2010). Sedangkan Mitsuo Nakamura, Pengamat Islam dari Jepang, mengatakan, *“Muhammadiyah selama ini lebih bersifat egosentrik, subyektif, dan terlalu memuji diri sendiri atau narsis. Pencapaian yang diklaim sebagai keberhasilan Muhammadiyah susah diukur”* (Suara Pembaruan, 7 Juli 2010). Burhanuddin Muhtadi, Peneliti LSI, juga mengkritik peran Muhammadiyah selama ini dengan mengatakan:

“Muhammadiyah kini mengalami disorientasi gerakan. Muhammadiyah memainkan peran dan tugas negara seperti membangun lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan amal usaha lainnya. Terjebak dalam rutinitas pengelolaan amal usaha itu, Muhammadiyah lupa memberikan terobosan pemikiran dalam pembangunan bangsa dan demokratisasi” (Kompas, 6 Juli 2010)

Dari aspek yang lain mengenai peran Muhammadiyah, Azyumardi Azra, Mantan Rektor UIN Jakarta menyebutkan bahwa Muhammadiyah seharusnya bisa lebih berorientasi kepada pencarian solusi, tidak sekedar mengkritik kebijakan dan mengeluarkan fatwa baru yang justru berpotensi kontraproduktif. Azyumardi mengatakan, *“Muhammadiyah sekarang telah jadi sangat legalistik, orientasinya sudah terlalu berfokus pada fiqih (bukum Islam)”* (Media Indonesia, 2 Juli 2010).

Kritikan terakhir terhadap Muhammadiyah selama muktamar berkaitan dengan sikap keterbukaan Muhammadiyah yang justru sekarang dianggap tertutup. Tertutupnya keterbukaan Muhammadiyah ini mendapat perhatian dari A. Munir Mul Khan, Anggota Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan PP Muhammadiyah. Menurut Munir Mul Khan, meski

didirikan berdasarkan nilai-nilai Islam yang kuat, sejak awal Muhammadiyah adalah organisasi terbuka yang menerima non-muslim ataupun warga negara nonpribumi sebagai anggotanya. Namun perkembangan sekarang justru keterbukaan yang menjadi roh asli Muhammadiyah mulai ditentang kadernya sendiri. Munir mengatakan, *“keterbukaan yang menjadi roh asli Muhammadiyah itu kini justru justru mendapat tentangan dari kader dan aktivis Muhammadiyah sendiri yang lebih mengidentifikasikan organisasi mereka sebagai gerakan purifikasi agama”* (Kompas, 6 Juli 2010). Keprihatinan yang sama juga dilontarkan oleh A. Syafi'i Maarif, Penasehat PP Muhammadiyah. Menurut Syafi'i Maarif, saat ini sangat sedikit perhatian Muhammadiyah terhadap keberlanjutan proses pembaruan pemikiran yang mencerahkan di Muhammadiyah. Lebih lanjut Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini juga mengatakan, *“tidak terkelolanya pembaruan pemikiran yang terus menerus itu membuat Muhammadiyah saat ini cenderung tertutup atau eksklusif. Pluralisme yang menjadi dasar pendirian Muhammadiyah justru ditentang oleh sebagian kader dan aktivis Muhammadiyah saat ini”* (Kompas, 6 Juli 2010).

Kritik-kritik yang ditampilkan oleh surat kabar terhadap Muhammadiyah selama muktamar merupakan salah satu bentuk representasi yang ditampilkan surat kabar mengenai Muhammadiyah. Dalam praktik perepresentasian kritik atau representasi yang bersifat negatif dapat mengarah kepada apa yang disebut misrepresentasi. Misrepresentasi merupakan salah satu bentuk representasi yang tidak sebagaimana mestinya. Bila dikaitkan dengan framing maka misrepresentasi merupakan sisi lain dari dari aspek yang ditonjolkan dalam sebuah pemberitaan. Karena framing merupakan produk dari konstruksi media, maka apa yang ditampilkan surat kabar dalam bentuk kritikan terhadap Muhammadiyah juga hasil dari konstruksi media yang sangat subyektif, tergantung pada kepentingan dan hubungan ideologis surat kabar terhadap obyek yang menjadi obyek pemberitaannya.

BAGIAN 4

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa simpulan penting yaitu: pertama pola-pola pemberitaan surat kabar mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam selama Muktamar ke-46 dapat dilihat dari beberapa kategori pola pemberitaan. Dari segi jumlah pemberitaan, secara keseluruhan terdapat 62 berita, di mana Republika memuat berita terbanyak, 22 berita (35%) dan Suara Pembaruan paling sedikit, 7 berita (11%). Sedangkan berkaitan dengan pola sumber berita, terdapat 217 sumber yang dipakai surat kabar dalam memberitakan Muhammadiyah selama muktamar, paling banyak adalah sumber dari PP Muhammadiyah, yakni 69 sumber (32%). Sumber berita ini bila dilihat dari kategori sumber dari kalangan Muhammadiyah dan kalangan non-Muhammadiyah, maka sumber yang banyak digunakan surat kabar dari kalangan Muhammadiyah sendiri, yaitu 160 sumber (74%) dan hanya 57 (26%) sumber yang berasal dari kalangan non-Muhammadiyah. Adapun bila dilihat dari nama sumber dari kalangan Muhammadiyah yang digunakan surat kabar, maka Din Syamsuddin adalah sumber yang paling banyak dijadikan rujukan oleh surat kabar, yakni 23 kali (14%).

Mengenai isu-isu yang ditonjolkan surat kabar mengenai Muhammadiyah selama muktamar, di antaranya isu mengenai peran Muhammadiyah, hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah, keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah, hubungan Muhammadiyah dengan politik, dan isu mengenai regenerasi di tubuh Muhammadiyah. Sedangkan berkaitan dengan kecenderungan isi berita surat kabar mengenai Muhammadiyah dapat diketahui isi beritanya cenderung netral, 38 berita (61). Namun bila dilihat dari kecenderungan isi berita positif dan negatif, maka berita-berita mengenai Muhammadiyah cenderung negatif, yakni sebanyak 15 berita (24%), sedangkan yang cenderung positif sebanyak 9 berita (15%).

Kedua, mengenai representasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di surat kabar selama Muktamar ke-46 terdapat beberapa representasi yang ditampilkan surat kabar, tergantung surat kabar dan isu yang ditonjolkannya. Mengenai isu peran Muhammadiyah bagi masyarakat dan bangsa, surat kabar merepresentasikan Muhammadiyah sebagai organisasi pencerahan. sedangkan berkaitan dengan isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah (negara), surat kabar merepresentasikan hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah adalah loyal-kritis atau baik dan proporsional. Adapun dalam isu mengenai keterwakilan perempuan di PP Muhammadiyah, surat kabar terlihat berbeda dalam menampilkan Muhammadiyah. Kompas merepresentasikan PP Muhammadiyah sebagai institusi yang tertutup bagi perempuan. Di sisi lain, Media Indonesia merepresentasikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang

mengakomodasi perempuan di PP Muhammadiyah. Selanjutnya, berkaitan dengan isu mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik praktis, surat kabar merepresentasikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang netral terhadap politik (nonpolitik) dan nonpartisan. Mengenai isu regenerasi di tubuh Muhammadiyah surat kabar merepresentasikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang gagal dalam proses regenerasi dan kaderisasi.

Ketiga, selain wacana dominan yang diframing surat kabar dan sebagai bentuk representasi Muhammadiyah di surat kabar, terdapat pula isu-isu yang tidak menonjol tapi memiliki nilai kontroversi sehingga menarik dikaji lebih mendalam. Beberapa isu itu adalah isu mengenai pencalonan Muchdi Pr sebagai ketua PP Muhammadiyah, isu mengenai kemungkinan adanya intervensi terhadap Muhammadiyah, isu mengenai calon-calon ketua PP Muhammadiyah dari partai politik, isu mengenai kepemimpinan Muhammadiyah, dan isu mengenai sistem pemilihan ketua PP Muhammadiyah.

Keempat, selama muktamar ke-46 Muhammadiyah, surat kabar juga melontarkan beberapa kritik terhadap Muhammadiyah. Kritik-kritik yang ditujukan kepada Muhammadiyah tersebut di antaranya mengenai tidak adanya perwakilan perempuan di PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah dianggap tertutup bagi perempuan. Selain itu mengenai regenerasi dan kaderisasi di tubuh Muhammadiyah yang dianggap gagal, karena Muhammadiyah terjebak pada pragmatisme organisasi dan terlalu tergantung pada para elitnya. Kritik yang lain juga mengenai kepemimpinan Muhammadiyah selama ini yang dianggap tidak dapat menjaga jarak dengan dunia politik, dan dianggap terlalu vokal dalam mengkritik pemerintah. Sedangkan mengenai peran Muhammadiyah surat kabar juga melontarkan kritikan. Muhammadiyah saat ini dianggap telah terjebak pada aspek legalitas fiqih saja, sementara peran pembaruannya tidak ada. Muhammadiyah juga dikritik mengenai keterbukaan Muhammadiyah sebagai roh asli Muhammadiyah yang justru kini semakin tertutup dan ditentang oleh kader dan aktivisnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Boy, P. ZTF. 2009. *Para Pembela Islam Pertarungan Konservatif dan Progresif di Tubuh Muhammadiyah*. Depok: Gramata Publishing.
- Bungin, B. 2007. *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Burhani, A.N. *Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) Pemberontakan Melawan Puritanisme dan Skripturalisme Persyarikatan*, dalam Imam Tolkhah dan Neng Dara Affiah (editor). *Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru Upaya Merambah Dimensi Baru Islam*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- . 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Gans, H.J. 1979. *Deciding What's News, A Study of CBS Evening News, NBC News, Newsweek and Time*. New York: Vintage Book.
- ISAI dan Yayasan Alumni Tempo. 1997. *Seandainya Saya Wartawan Tempo*. Jakarta: Penerbit ISAI dan Yayasan Alumni Tempo.
- Kriyantono, R. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah. 2010. *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Kompas.
- Nashir, H. 2006. *Menegubkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UMM Press.
- Nashir, H. 2014. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Neuman, L.W. 1997. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*, third edition. MA: Allyn and Bacon.
- Ramadhan, S. 2004, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial Baru: Mencari Makna Baru bagi Gerakan Muhammadiyah*, dalam Pradana Boy ZTF & M Hilmi Faiq (editor). "Kembali Ke Al Qur'an Menafsir Makna Zaman, Suara-suara Kaum Muda Muhammadiyah". Malang: UMM Press.
- . 2009. *Peran Media Massa dalam Internalisasi Nilai-nilai Agama untuk Membina Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia (Analisis Isi Surat Kabar Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Suara Pembaruan)*. Hasil Penelitian. Jakarta: Litbang Depag RI.
- . 2010. *Wacana Keislaman selama Kampanye Pemilihan Presiden 2009 dalam Pemberitaan Surat kabar (Analisis Semiotik Hassan-Halliday mengenai Berita-berita Keislaman di Surat kabar Kompas, Republika, dan Media Indonesia)*. Hasil Penelitian. Jakarta: FISIP UHAMKA.

- Shoemaker, P.J & Stephen D Reese. 1996. *Mediating The Message, Theories of Influences on Mass Media Content*. New York: Longman Publisher.
- Sigal, L.V. 1973. *Reporters and Officials, The Organization and Politics of Newsmaking*. Toronto: DC Heath.
- Sobur, A. 2001. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Rosda.
- Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah. 2010. *Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah, dan Langkah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

BIOGRAFI PENULIS

Said Romadlan, lahir di Lamongan, 26 September 1974. Lulus dari Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) tahun 2001. Saat ini adalah dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA). Selain itu penulis juga aktif di Al Maun Institute Jakarta sebagai Wakil Direktur Eksekutif. Mulai menulis sejak di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Selama sebagai mahasiswa di FISIPOL Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 1992-1997, aktif di penerbitan kampus BESTARI. Pernah terlibat dalam Masyarakat Pemantau Media (1999-2000) sebagai peneliti, dan sebagai salah seorang penggagas terbentuknya Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM).